

**PLATFORM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DALAM PENGEMBANGAN KADER MUDA
(Studi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI Perjuangan) Provinsi Lampung)**

Skripsi

Oleh

**SINDI KURNIAWATI
NPM 2116021035**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PLATFORM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DALAM PENGEMBANGAN KADER MUDA
(Studi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI Perjuangan) Provinsi Lampung)**

Oleh

SINDI KURNIAWATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PLATFORM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PENGEMBANGAN KADER MUDA (Studi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Lampung)

OLEH

SINDI KURNIAWATI

Penurunan citra positif dan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik, termasuk PDI Perjuangan, mendorong perlunya regenerasi kader muda sebagai strategi menjaga eksistensi dan keberlanjutan ideologi partai. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung dalam mewariskan platform partai kepada kader muda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fungsi Platform Partai dalam Penerapannya menurut Prasetya (2011), dengan tiga indikator utama yaitu: pembentukan sikap dan orientasi politik, rekrutmen dan kaderisasi, serta partisipasi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam indikator pembentukan sikap dan orientasi politik, PDI Perjuangan telah menjalankan fungsi sosialisasi ideologis melalui pendidikan politik di Badiklat, penanaman nilai-nilai Marhaenisme dan Pancasila, serta pelibatan kader dalam kegiatan yang membumikan ajaran Bung Karno. Namun, belum adanya alat ukur terstandar untuk menilai kedalaman penghayatan ideologi menjadi tantangan tersendiri. Pada aspek rekrutmen dan kaderisasi, partai telah mengimplementasikan sistem kaderisasi berjenjang dan seleksi kader berbasis loyalitas serta ideologi. Meskipun demikian, proses ini masih menghadapi kendala seperti dominasi elit senior, budaya patronase, dan akses terbatas kader muda terhadap ruang strategis dalam partai. Sedangkan dalam indikator partisipasi politik, kader muda telah diberi ruang untuk aktif dalam kampanye, advokasi kebijakan, serta kegiatan sosial dan digital politik. Namun, pelibatan kader masih bersifat teknis dan belum menyentuh ranah pengambilan keputusan strategis partai secara penuh. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa meskipun DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung telah menjalankan fungsi-fungsi platform partai sesuai teori Prasetya, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Diperlukan strategi afirmatif yang lebih inklusif dan berbasis meritokrasi untuk memperkuat regenerasi ideologis dan politik kader muda, sehingga platform partai dapat diwariskan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PDI Perjuangan, kaderisasi, Marhaenisme, platform partai, kader muda

ABSTRACT

THE PLATFORM OF THE INDONESIAN DEMOCRATIC PARTY OF STRUGGLE IN YOUTH CADRE DEVELOPMENT (A Study At The Regional Leadership Council Of The Indonesian Democratic Party Of Struggle (PDI Perjuangan) In Lampung Province)

BY

SINDI KURNIAWATI

The decline in positive public perception and trust in political parties, including the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan), highlights the need for the regeneration of young cadres as a strategic effort to maintain the party's ideological continuity and relevance. In this context, this study aims to analyze how the Regional Leadership Council (DPD) of PDI Perjuangan in Lampung Province strives to transmit the party's platform to its young cadres. The theoretical framework used is *The Function of Party Platforms in Practice* by Prasetya (2011), which includes three main indicators: the formation of political attitudes and orientation, recruitment and cadre development, and political participation. This research adopts a qualitative descriptive approach using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings indicate that in terms of shaping political attitudes and orientation, the party has conducted ideological socialization through political education at the party's training center (Badiklat), promotion of Marhaenism and Pancasila values, and involvement of young cadres in grassroots activities inspired by Bung Karno's teachings. However, the absence of standardized tools to assess ideological internalization remains a significant challenge. Regarding recruitment and cadre development, the party has implemented a tiered system based on ideological commitment and loyalty. Nevertheless, challenges persist, including senior elite dominance, patronage culture, and limited access for young cadres to strategic positions. In terms of political participation, young cadres have been given space to engage in campaigns, policy advocacy, and both social and digital political activities. However, their involvement remains mostly technical and has yet to extend into strategic party decision-making. It can thus be concluded that although DPD PDI Perjuangan of Lampung Province has implemented the party platform functions as theorized by Prasetya, the execution still faces structural and cultural barriers. An inclusive, merit-based affirmative strategy is necessary to strengthen the ideological and political regeneration of young cadres so that the party's platform can be effectively and sustainably transmitted to future generations.

Keywords: PDI Perjuangan, cadre formation, Marhaenism, party platform, young cadres.

Judul Skripsi

: PLATFORM PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN DALAM
PENGEMBANGAN KADER MUDA (Studi di
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi
Lampung)

Nama Mahasiswa

: Sindi Kurniawati

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116021035

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawan Purba, S. IP, M. IP

NIP. 198106012010121003

Bendi Juantara, S. IP., M.A

NIP. 198809232019031011

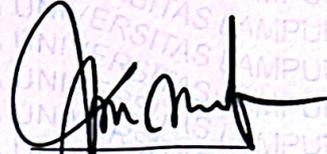
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Tabah Maryamah

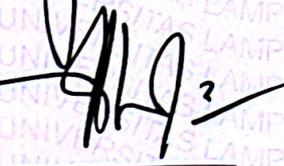
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

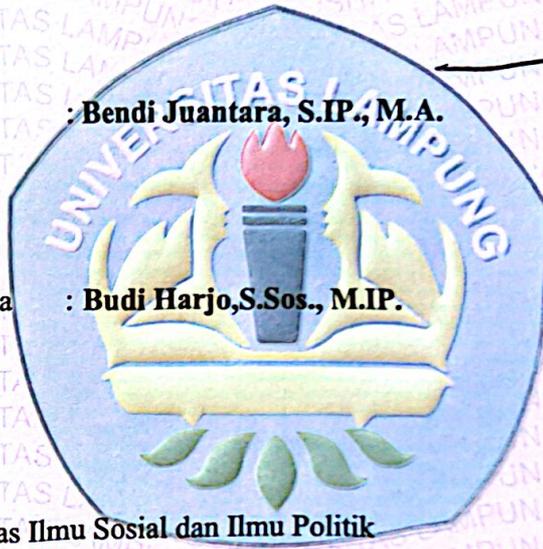
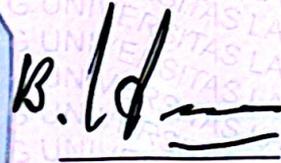
Ketua : Darmawan Purba, S. IP, M. IP.



Sekretaris : Bendi Juantara, S.IP., M.A.



Penguji Utama : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 April 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan



Sindi Kurniawati
NPM 2116021035

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Sindi Kurniawati, dilahirkan di Gisting pada tanggal 22 Agustus 2001. Peneliti merupakan Putri kedua dari 3 bersaudara dari Bapak Sukardi dan Ibu Sri Murtini. Peneliti memiliki satu orang kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK PKK Gisting Atas yang diselesaikan tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Gisting Atas tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 1 Gisting pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMK Penerbangan Lampung pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 Peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung.

Pada saat melaksanakan Studi Ilmu Pemerintahan, penulis terlibat dalam beberapa kegiatan baik kegiatan penulisan maupun kegiatan sosial yang berkaitan dengan keilmuan yang penulis sedang jalani, yaitu :

- a. Anggota English Society Universitas Lampung Tahun 2021
- b. Anggota Biro Kerjasama Forum GenRe Lampung Tahun 2023
- c. Wakil Kepala Bidang Finansial PIK R RAYA Universitas Lampung Tahun 2023
- d. Broadcaster Academy Batch 5 PRO 2 RRI Bandar Lampung Tahun 2024
- e. Juara 2 Putri Duta GenRe Universitas Lampung Tahun 2022
- f. Inovasi terbaik ke-6 pada Kompetisi PLN Inovation & Competition in Electricity (PLN ICE) Tahun 2023, dengan judul “EkoVisata : Smart Eco Tourism in Harapan Jaya Village, Pesawaran Regency”.
- g. Delegasi Mahasiswa dalam Petukaran Mahasiswa Merdeka Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023
- h. Delegasi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Oleh Kementerian Pemuda

Dan Olahraga Tahun 2023

- i. Koordinator Sponsor dalam Kegiatan Pemilihan Duta GenRe Universitas Lampung Oleh PIK R Raya Tahun 2023
- j. Kajian Kebutuhan Infrastruktur Minimal untuk Menunjang Peningkatan PAD dalam Sektor Perhubungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023
- k. Kajian *Dance Theater* Sebagai Upaya Mitigasi Bencana *Landslide* Di Kota Bandar Lampung (Studi Karya *Dance Theater* Berbasis Mitigasi Bencana Oleh Sanggar Eksternal Kampus) (PENELITIAN) Tahun 2024
- l. Narasumber Governance Podcast Oleh HMJ Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Tahun 2023
- m. Pemateri dalam Acara Seminar Public Speaking dan LKTD Oleh HMJ Pendidikan Biologi Uin Raden Intan Lampung Tahun 2024

Demikian aktivitas sejak rentang tahun 2021 hingga 2024. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri, untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabd.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Yang Sudah Tertakar Tidak Akan Tertukar”

(R.A. Kartini)

“Terbentur, terbentur,terbentur, terbentuk”

(Tan Malaka)

“Long Life Learner”

(Sindi Kurnia)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk ...

Bapak dan Ibu Tercinta

Terimakasih tak terhingga selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak seorang yang sederhana bisa menjadi sarjana.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Terimakasih untuk keluarga besar "**Jurusan Ilmu Pemerintahan**" dan Almamater tercinta "**Universitas Lampung**"

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pengembangan Kader Muda (Studi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang

Akademik;

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Abang Darmawan Purba, S.IP, M.IP. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses bimbingan skripsi sejak awal hingga selesai. Waktu, saran, dan masukan yang diberikan sangat berharga bagi keberhasilan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, serta atas pengalaman berharga yang telah dibagikan. Rasa hormat dan bangga penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan abang. Semoga abang selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT di setiap langkah.
8. Abang Bendi Juantara, S.IP, M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, masukan, semangat, motivasi yang diberikan dalam membimbing penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang abang berikan, yang selalu menyemangati dan menginspirasi. Rasa hormat dan bangga penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan abang. Semoga abang selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT di setiap langkah.
9. Bapak Budi Harjo S.Sos, M.IP, selaku Dosen Pembahas atas saran, kritik, dan masukan berharga yang telah memperkaya dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberkahi kesehatan, kebijaksanaan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT di setiap langkah pengabdian.
10. Bung Deddy Wijaya Chandra, S.Kom, Bapak H. Watoni Noerdin, S.H.,M.H, Ibu Aprilliati, S.H.,M.H, Abang Dr. Yanuar Irawan, S.E,

M.M, Mba Lesty Putri Utami, S.H., K.Kn, Bapak Ignatius Agus Suwardaya, dan Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A Sebagai bagian penting dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak dan Ibu atas waktu serta kesediaannya berbagi wawasan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah kehidupan.

11. Bapak dan Ibu dosen seluruh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan dan dalam lindungan-Nya.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, khususnya ibu Merta Yana dan Mba Sella yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi penulis selama perkuliahan ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Sukardi dan pintu surgaku, Ibu Sri Murtini, yang tiada hentinya memberikan semangat, kasih sayang, doa, motivasi dengan penuh keikhlasan untuk penulis serta tenaga yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih untuk semua hal yang bapak dan ibu berikan. Terimakasih selalu menjadi tempat penulis untuk pulang. Bapak dan ibu adalah alasan terkuat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini langkah awal suci untuk terus membanggakan bapak dan ibu.
14. Adik dan kakak tersayang, Ahmad Umar Rifaldi dan Erni Kusumastuti S.Pd. Terimakasih untuk selalu ikut serta dalam proses menempuh Pendidikan selama ini, Terimakasih atas semangat, doa, da cinta yang diberikan kepada penulis. Semoga sehat selalu, sukses dalam berkarir, selalu dalam lindungan Allah SWT.
15. Keponakan penulis terkasih, Syifa Egis Safitri dan Aiza Rania

Anindyaswari. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis bahagia, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Semoga sehat selalu, sukses dalam setiap langkah Pendidikan yang sedang ditempuh, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

16. Sahabat kecil penulis, Alm. Dila Nurlita. Terimakasih atas setiap kenangan, tawa, dan kebersamaan yang pernah diberikan. Seseorang yang selalu hadir dalam ingatan dan hati. Meski raga tak lagi bersama, semangat dan kebaikanmu tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Karya ini penulis baktikan sebagai bukti bahwa impian yang dulu sering kita bicarakan tetap penulis lanjutkan.
17. Kepada sahabat yang tak kalah penting kehadirannya, Yolanda Sabrina Putri. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, sejak langkah pertama di dunia perkuliahan sampai detik terakhir perjuangan menyelesaikan skripsi. Selalu ada menjadi tempat berbagi cerita, penyemangan disaat sulit dan alasan untuk terus melangkah. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari banyak impian yang kita wujudkan di masa depan.
18. Pejuang S.I.P, Indah Aulia, Resha Amanda Putri dan Elsa Mardalena yang telah menemani setiap langkah dalam perjalanan penulis. Terimakasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Semoga keberhasilan ini menjadi awal baru dari perjalanan besar kita selanjutnya. Semoga sehat selalu dan sukses dalam berkarir di masa depan.
19. Kepada Teman-teman magang, Annisa Amimi dan Salsabila Al Fatahny. Terimakasih telah hadir memberikan banyak ilmu berharga, memberikan kebahagiaan selama proses magang. Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam karirnya dimasa depan.
20. Teman-teman KKN periode 1 Tahun 2024, Nada Nurhaliza, Syarifullah, Cucu Cahyati, Aryo dan Joice yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terimakasih atas dukungan, tawa, serta kebersamaan yang membuat tantangan terasa lebih ringan.

Semoga kebersamaan kita tetap terjalin dan setiap langkah kita ke depan dipenuhi kesuksesan.

21. Masyarakat kampung Bumi Agung, khususnya pakwo dan kadus, serta seluruh masyarakat atas sambutan hangat, dukungan dan kebersamaannya selama KKN. Terimakasih atas bimbingan, arahan serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk belajar dan berkontribusi di tengah masyarakat.
22. Untuk sosok yang namanya belum bisa penulis tuliskan disini, tetapi telah tertulis dengan sempurna di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari semangat yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebuah langkah kecil dalam memantaskan diri. Saat ini penulis tidak tahu dimana takdir menempatkanmu, di sudut bumi mana engkau berpijak, atau jemari siapa yang kini kau genggam. Namun, seperti yang pernah dikatakan seseorang, jika memang kau dituliskan untukku, maka semesta pun akan menuntun langkah kita untuk saling menemukan.

Dengan penuh rasa syukur, penulis kembali mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini baik yang namanya tertera maupun yang tak tercantum, baik yang hadir secara langsung maupun yang hanya bersua dalam pemikiran. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu, penelitian, serta pengabdian, khususnya dalam bidang pemerintahan, demi kemajuan masyarakat dan Universitas Lampung.

BandarLampung, 17 Maret 2025

Sindi Kurniawati

NPM. 2116021035

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Platform	13
2.1.1 Definisi Platform.....	13
2.1.2 Fungsi Platform Partai Dalam Penerapannya	16
2.1.3 Aspek Fundamental Platform Partai	19
2.2 Tinjauan Tentang Kaderisasi.....	20
2.2.1. Definisi Kaderisasi	20
2.2.2. Prinsip Kader.....	23
2.2.3. Kriteria Kader.....	25
2.3 Tinjauan Tentang Partai Politik	27
2.3.1. Definisi Partai Politik.....	27
2.3.2. Fungsi Partai Politik.....	30

2.3.3. Partisipasi Politik	32
2.4. Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	38
3.2. Lokasi Penelitian.....	40
3.3. Fokus Penelitian.....	40
3.4. Penentuan Informan	43
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	46
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7. Teknik Pengolahan Data	50
3.8. Teknik Analisis Data.....	51
3.9. Teknik Validasi/Keabsahan Data.....	53
IV. GAMBARAN UMUM	
4.1. Sejarah Dan Profil PDI Perjuangan.....	54
4.1.1. Sejarah Berdirinya PDI Perjuangan	54
4.1.2 Struktur Organisasi Partai	56
4.1.3 Visi Dan Misi Partai.....	60
4.2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Lampung	63
4.2.1. Profil Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi (PDI) Perjuangan Provinsi Lampung	63
4.2.2. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi (PDI) Perjuangan Provinsi Lampung	64

4.2.3. Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Lampung	65
--	----

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pembentukan Sikap Dan Orientasi Politik.....	68
5.1.1. Pembentukan Nilai-Nilai Dasar	68
5.1.2. Pengembangan Kepribadian Politik.....	75
5.1.3. Pendidikan Politik.....	84
5.2. Rekrutmen Dan Kaderisasi	90
5.2.1. Seleksi Dan Pemilihan Kader	90
5.2.2. Pengembangan Kaderisasi	100
5.2.3. Pembentukan Jaringan Politik	104
5.3. Partisipasi Politik	112
5.3.1 Kesadaran Politik.....	112
5.3.2 Keterlibatan Aktif	117
5.3.3. Keterampilan Politik.....	124
5.4. Analisis Platform Partai Dalam Pengembangan Kader Muda	130

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	135
6.2. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA	139
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	143
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian.....	45
2. Daftar hadir peserta diklat madya I DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung	73
3. Triangulasi Data Penelitian.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Negara	4
2. Grafik Citra Positif dan Tingkat Kepuasan Partai Politik di Mata Publik 2025	5
5. Kerangka Pikir	37
6. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Provinsi Lampung	65
7. Dokumentasi Kegiatan Pemberian Materi Kaderisasi Tingkat Madya	74
8. Kader Muda Melakukan Kegiatan Penyaluran Bantuan Peduli Covid-19	77
9. Kader Muda Perempuan Lesty Putri Utami terlibat dalam kegiatan sosial partai	77
10. Dokumentasi kegiatan bedah buku	83
11. Dokumentasi Kegiatan Pendidikan Politik	89
12. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung	96
13. Daftar Kader Lolos Seleksi dan Terpilih	98
14. Statistik Keanggotaan Partai	109
15. Kader bersama Politisi Muda dari Berbagai Partai Politik dalam	

Kegiatan Sekolah Politisi Muda.....	111
16. Kegiatan Lesty Putri Utami dalam Diskusi pada Sekolah Legislatif.....	116
17. Kader Muda Deddy Wijaya Chandra Menjadi Koordinator Acara Rakerda III.....	123
18. Dokumentasi Lesty Putri Utami Terlibat Dalam Penyampaian Pandangan Umum Lanjutan Tingkat I Terhadap Raperda APBD Perubahan	123

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
PDI Perjuangan	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
NGO	: Non-Government Organization
PNI	: Partai Nasional Indonesia
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KLB	: Kongres Luar Biasa
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
PAC	: Pengurus Anak Cabang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ideologi, sebuah konsep yang berakar dari bahasa Latin, merupakan perpaduan antara "*ideos*" yang bermakna pemikiran dan "*logis*" yang berarti logika, ilmu, atau pengetahuan. Menurut Syariati ideologi telah berkembang menjadi suatu disiplin yang kompleks, mencakup studi tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Lebih dari sekadar kumpulan gagasan, ideologi berfungsi sebagai katalis yang mampu membangkitkan dan mengarahkan pemikiran serta semangat hidup manusia, terutama di kalangan generasi muda (Kristeva, N. S. S., 2010). Ideologi politik merupakan suatu konstruksi kompleks yang terdiri dari berbagai elemen pemikiran dan nilai yang saling terkait. Pada intinya, ideologi politik atau Platform partai dapat dipahami sebagai suatu sistem yang komprehensif, mencakup serangkaian nilai-nilai fundamental, gagasan-gagasan kritis, serta norma-norma etis yang dianut oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Sistem ini juga melibatkan kepercayaan mendalam dan keyakinan kuat yang membentuk pandangan dunia. Keseluruhan elemen ini berfungsi sebagai kerangka acuan yang memandu seseorang dalam menafsirkan, memahami, dan merespons berbagai fenomena politik yang terjadi di sekitarnya (Budiardjo, M., 2008).

Lebih jauh lagi, ideologi politik berperan sebagai kompas moral dan intelektual yang mengarahkan sikap seseorang terhadap isu-isu politik yang dihadapinya, mulai dari kebijakan pemerintah, konflik sosial, hingga perdebatan tentang arah pembangunan negara. Tidak hanya berhenti pada tataran pemikiran, ideologi politik juga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk dan menentukan perilaku

politik seseorang. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek partisipasi politik, seperti pilihan dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam gerakan sosial, atau bahkan keputusan untuk bergabung dengan partai politik tertentu. Dengan demikian, ideologi politik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara ide dengan aksi, memungkinkan transformasi dari pemikiran abstrak menjadi tindakan nyata dalam arena politik. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ideologi politik ini menjadi krusial dalam menganalisis dinamika politik kontemporer, mengingat perannya yang vital dalam membentuk lanskap politik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Budiardjo, M., 2008).

Pada dasarnya, Platform partai berisi panduan umum dan garis besar kebijakan yang akan ditempuh oleh partai dalam upayanya berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, tentunya dalam bingkai kepentingan bangsa dan negara. Di dalam Platform partai, termuat hal-hal yang bersifat fundamental dan menjadi prioritas perjuangan politik, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja maupun penentuan sikap partai terhadap isu-isu politik yang berkembang. Platform ini juga dapat dipandang sebagai ruh atau spirit yang menjiwai seluruh gerak partai politik. Lebih jauh lagi, Platform partai merupakan wadah di mana seluruh sistem nilai dan norma yang dianut partai diterjemahkan menjadi landasan bagi penyusunan hal-hal yang lebih konkret dan aplikatif. Tidak hanya itu, Platform partai juga memuat komitmen partai politik dalam menjalankan roda organisasi serta visi mereka terkait kontribusi yang ingin diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, Platform partai menjadi elemen vital yang mencerminkan identitas, arah perjuangan, dan komitmen suatu partai politik dalam berkiprah di kancah perpolitikan nasional (Kurniasih, 2019).

Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019-2024, Ideologi Marhaenisme yang dianut oleh PDI Perjuangan berakar dari ajaran Bung Karno yang menekankan konsep perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan sosial. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai PDI Perjuangan, dijelaskan bahwa partai ini menganut asas Pancasila, yang menjiwai segala bentuk pergerakan politiknya,

termasuk dalam memperjuangkan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Marhaenisme adalah filosofi kerakyatan yang menekankan pentingnya kemandirian rakyat kecil (Marhaen), seperti petani, buruh, dan nelayan, untuk melawan ketidakadilan dari kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu, PDI Perjuangan secara ideologis berkomitmen untuk mendidik, mengorganisir, dan memobilisasi rakyat sebagai kekuatan utama dalam mencapai cita-cita kedaulatan bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

PDI Perjuangan melalui Marhaenisme berusaha menghidupkan semangat gotong royong dan sosio-nasionalisme yang memprioritaskan kepentingan kolektif rakyat di atas kepentingan individu atau golongan tertentu. Dalam konteks politik, partai ini menolak segala bentuk liberalisme yang berorientasi pada individualisme dan kapitalisme yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Marhaenisme juga mengarahkan partai untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat, seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan spiritual yang mencakup pendidikan dan kesehatan. Dalam perjuangannya, PDI Perjuangan tidak hanya mengandalkan kekuasaan politik, tetapi juga membangun kesadaran rakyat tentang hak-hak mereka melalui pendidikan politik dan kaderisasi yang berfokus pada penguatan ideologi Pancasila dan semangat Trisakti yang dicanangkan oleh Bung Karno.

TINGKAT KEPERCAYAAN LEMBAGA NEGARA

Kami akan menyebutkan beberapa nama lembaga. Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga tersebut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?..... (%)



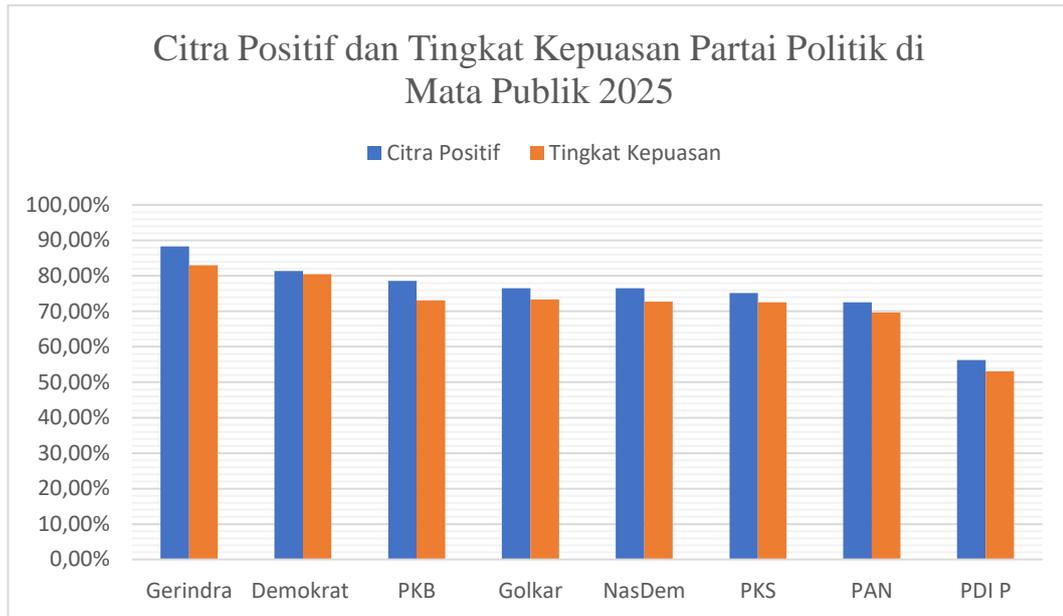
INDIKATOR

SURVEI NASIONAL: 30 DES'23 - 6 JAN'24

29

Gambar 1. Grafik Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Negara
Sumber. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (2024)

Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 oleh Indikator, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga negara menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi, di mana 19% responden menyatakan sangat percaya dan 70% cukup percaya. Sementara itu, Presiden juga mendapatkan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi, dengan 20% responden sangat percaya dan 66% cukup percaya. Namun, jika menyoroti tingkat kepercayaan terhadap partai politik, data menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kepercayaan publik yang rendah dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Hanya 6% responden yang menyatakan sangat percaya, sementara 58% cukup percaya. Sebanyak 29% responden menyatakan kurang percaya, dan 4% sama sekali tidak percaya. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun lebih dari setengah masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan yang cukup terhadap partai politik, ada ketidakpuasan yang cukup besar dengan hampir sepertiga responden mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Hal ini dapat menjadi refleksi dari persepsi masyarakat terhadap kinerja dan integritas partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia.



Gambar 2. Grafik Citra Positif dan Tingkat Kepuasan Partai Politik di Mata Publik 2025

Sumber. Survei Litbang Kompas (CNN, 2025), Diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan survei Litbang Kompas (CNN, 2025) tentang citra positif dan tingkat kepuasan partai politik di mata publik tahun 2025, PDI Perjuangan (PDI P) menempati posisi terendah dibandingkan partai politik lain dalam survei ini. Baik dalam aspek citra positif maupun tingkat kepuasan, PDI P tertinggal dari partai seperti Gerindra, Demokrat, PKB, Golkar, NasDem, PKS, dan PAN. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi rendahnya citra positif dan tingkat kepuasan publik terhadap PDI P adalah efektivitas platform partai dalam pengembangan kader muda. Internalisasi platform partai menjadi kunci dalam membangun citra positif, terutama melalui kaderisasi yang kuat, pendidikan politik yang sistematis, dan peran aktif kader muda dalam dinamika partai serta kebijakan publik. Jika kader muda tidak memahami atau tidak mampu menerapkan nilai-nilai ideologis partai dalam praktik politiknya, maka hal ini dapat berdampak pada persepsi negatif terhadap partai secara keseluruhan. Sebaliknya, jika kader muda mampu mengartikulasikan dan menjalankan platform partai dengan baik, maka hal ini akan berkontribusi pada peningkatan citra positif serta kepuasan publik terhadap PDI P di masa depan.

Di tengah perubahan lanskap politik ini, pengembangan kader muda menjadi semakin krusial bagi PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil wawancara dan pra penelitian kepada wakil bidang pemuda, olahraga dan pariwisata, Deddy Wijaya Chandra mengatakan bahwa ideologi partai sangat dipahami oleh para kadernya. PDI Perjuangan diamanatkan selalu beriringan bersama rakyat. Memiliki jiwa gotong royong dan selalu turun ke “bawah” menyapa rakyat. Jika dikatakan pergeseran ideologi, para kader selalu tegak lurus dengan ideologi partai, namun tidak ada indikator yang membuktikan hal tersebut. Wakil ketua bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata menambahkan terkait platform PDI Perjuangan memiliki badiklat (sekolah partai) yang tugasnya adalah mendidik kader untuk memahami lebih dalam cita-cita luhur partai, terhadap pentingnya menjaga ideologi partai yang didasari oleh empat pilar kebangsaan. Penurunan perolehan suara dan kursi yang dialami partai, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Lampung, mengindikasikan perlunya penyegaran dan inovasi dalam strategi politik partai.

Kader muda dapat menjadi kunci dalam upaya ini, mengingat potensi mereka untuk membawa ide-ide segar, memahami aspirasi generasi milenial dan Gen Z, serta memanfaatkan teknologi dan media sosial dalam kampanye politik. Selain itu, pengembangan kader muda juga penting untuk menjamin keberlangsungan dan regenerasi kepemimpinan partai di masa depan. Dengan demikian, Platform pengembangan kader muda menjadi aspek vital dalam strategi jangka panjang PDI Perjuangan untuk mempertahankan relevansi dan dominasinya di kancah politik, khususnya di Provinsi Lampung.

Pada penelitian sebelumnya, pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Kurniasih, (2019) dengan Judul “Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah”. Memberikan analisis tentang orientasi ideologi marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah. Penelitian mengenai hal tersebut dilakukan karena ideologi seringkali tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan, ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya kebijakan internal maupun eksternal sering bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideologi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif

dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ideologi sebagai landasan perjuangan telah diterapkan dalam konsep kerja organisasi DPD PDI-P Jawa Tengah. Namun, pemahaman kader dan anggota terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan masih terbatas pada tingkat informatif, belum mencapai tahap penghayatan dan penerapan nilai dalam tindakan. Hal ini mengakibatkan hambatan berupa kurangnya pemahaman konseptual dan praksis tentang marhaenisme, sehingga materialisasi nilai ideologis dalam kerja organisasi tidak berjalan efektif. Di sisi lain, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat menuntut DPD PDI-P Jawa Tengah untuk konsisten dalam menerjemahkan dasar perjuangan sesuai konteks ruang dan waktu dengan menggunakan analisis yang tajam. Berdasarkan temuan-temuan ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan ideologi dalam organisasi (Kurniasih.W, 2019).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Krisdianto, S. R., Anggadifa, Y. S., & Tamba, E. (2020). Dengan judul “Penerapan nilai-nilai marhaenisme pada dewan pimpinan daerah partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil Penelitian ini mengungkapkan implementasi nilai-nilai Marhaenisme oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi melalui arahan kepada anggota partai di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi. Fokus utama perjuangan mereka adalah kesejahteraan sosial, pembangunan manusia, pertanian, UMKM, dan infrastruktur yang berpihak pada kaum marhaen. Keberpihakan ini terwujud dalam berbagai kebijakan dan tindakan, seperti peraturan daerah tentang disabilitas dan penanganan konflik lahan. Anggota fraksi juga memprioritaskan kebutuhan petani dan pemberdayaan UMKM dalam menyusun pokok-pokok pikiran DPRD. Posisi PDI Perjuangan sebagai mayoritas di DPRD Provinsi Jambi, dengan salah satu kadernya menjabat sebagai Ketua DPRD, memungkinkan partai untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam fokus kebijakan dan anggaran yang berpihak pada kaum marhaen. Proses ini menegaskan komitmen partai terhadap kesejahteraan wong cilik, dengan Marhaenisme sebagai intisari dari Pancasila yang menjadi asas partai, sebagaimana tercantum dalam AD/ART PDI Perjuangan (Krisdianto, dkk, 2020).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Gerald, G. (2019). Dengan judul “Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS”. Memberikan analisis tentang Krisis ideologi dalam dinamika partai politik pasca reformasi (*democratization*) menjadi hal yang sangat anomali, mengingat demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan dialektika ide-ide politik dan ruang publik yang simetris. Pertarungan partai politik secara elektoral maupun di dalam sistem politik yang kompleks rupanya hanya mengedepankan hal-hal yang sifatnya simbolik dan artifisial. Kritik antar elit, perpindahan kader antar partai dan lahirnya partai politik bukan semata-mata pertarungan politik yang ideologis-filosofis. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan dinamika ideologis dan praktis dari tiga partai politik Indonesia. PDIP, dengan akar historis yang kuat dalam nasionalisme-marhaen, secara eksplisit mengelaborasi ide-ide Soekarno dalam AD-ARTnya, namun sering mengalami paradoks dalam implementasi kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal. PSI, sebagai partai baru, menawarkan gagasan demokrasi sosial dalam AD-ARTnya, meskipun masih memerlukan pembuktian dalam praktik pemerintahan. Sementara itu, PKS telah mengalami transformasi ideologi yang signifikan, beralih dari Islam fundamentalis ke Islam moderat, dengan menunjukkan perkembangan nilai-nilai nasionalisme-sekuler sejak pemilu 2004. Penelitian ini menyoroti kompleksitas antara ideologi formal partai dan implementasinya dalam arena politik praktis di Indonesia (Gerald, G. (2019).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Iswadi, I. (2020). Tentang “Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019”. Menganalisis mengenai momentum pemilu 2019 kontestasi politik kembali diwarnai pergulatan ideology yakni ideologi islamisme dan nasionalisme. Polemik tersebut berawal dengan mencuatnya isu keagamaan yang dimunculkan dipermukaan pelaku politik sebagai hegemoni dalam mengambil simpati pemilih. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menunjukkan hasil bahwa ideologi yang dianut oleh partai-partai politik di Indonesia secara formal tertuang dalam dokumen resmi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan filosofis dan pedoman operasional yang

mengarahkan setiap gerak langkah partai dalam arena politik nasional. Spektrum ideologis yang dianut oleh partai-partai di Indonesia menunjukkan keragaman yang signifikan, mencakup beberapa arus utama pemikiran politik seperti nasionalisme, islamisme, dan sintesis antara keduanya yang sering disebut sebagai nasionalis-religius. Setiap aliran ideologis ini membawa ciri khas tersendiri yang tercermin dalam strategi, program, dan gerakan politik partai yang bersangkutan. Meskipun terdapat keragaman ideologis di antara partai-partai politik, terdapat ekspektasi yang kuat bahwa setiap partai harus tetap beroperasi dalam kerangka nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila, dengan lima silanya, dipandang sebagai *common ground* yang menjembatani perbedaan ideologis antar partai dan menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kontestasi politik, partai-partai diharapkan untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan ideologi mereka tanpa keluar dari koridor Pancasila, sehingga tercipta dinamika politik yang konstruktif namun tetap menjaga kohesi nasional (Iswadi, I., 2020).

Kelima, jurnal yang ditulis Fauzi, M. R. (2013). Tentang “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Platform Partai Politik Dan Manajemen Partai Politik Terhadap Kinerja Kader Partai Politik Untuk Peningkatan Raihan Suara Partai Politik Di Kabupaten Garut”. Menganalisis tentang Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Platform Partai Politik dan Manajemen Partai Politik terhadap Kinerja Kader Partai Politik untuk peningkatan Raihan Suara Partai Politik di Kabupaten Garut. Menggunakan metode penelitian ini adalah metode eksplanasi dengan teknik evaluasi. Menunjukkan bahwa Platform partai politik memainkan peran krusial dalam membentuk dan mengarahkan kinerja kader, berfungsi sebagai landasan fundamental untuk merancang dan mengeksekusi program-program partai. Kejelasan dan konsistensi Platform ini tidak hanya mempertahankan relevansi dan daya tarik partai di mata publik, tetapi juga membekali para kader dengan arah yang pasti dalam upaya mereka mendemonstrasikan kehadiran partai di masyarakat. Implementasi efektif dari Platform tersebut berpotensi meningkatkan perolehan suara dalam pemilihan umum, sekaligus meningkatkan peluang partai untuk memenangkan kursi di lembaga legislatif maupun posisi di cabang eksekutif pemerintahan. Dengan demikian, Platform partai berfungsi sebagai kompas strategis yang menuntun partai

dan kadernya menuju pencapaian tujuan politik yang lebih luas dan berkelanjutan (Fauzi, M. R. (2013).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Pertama, fokus penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada orientasi ideologi Marhaenisme, penerapan nilai-nilai Marhaenisme dalam kebijakan partai, atau perbandingan ideologi antar partai politik. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji Platform PDI Perjuangan dalam konteks pengembangan kader muda. Kedua, lokus penelitian. Studi-studi terdahulu dilakukan di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jambi, atau cakupan nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Ketiga, subjek penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya melihat partai secara keseluruhan atau membandingkan beberapa partai, sementara penelitian ini secara khusus menyoroti kader muda partai.

Keempat, aspek yang diteliti. Studi-studi terdahulu lebih banyak membahas tentang penerapan ideologi dalam kebijakan partai atau kinerja kader secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada strategi pengembangan kader muda melalui Platform partai. Kelima, konteks temporal. Mayoritas penelitian sebelumnya dilakukan beberapa tahun lalu, sementara penelitian ini kemungkinan mencakup perkembangan terkini dalam strategi kaderisasi PDI Perjuangan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pengembangan Kader Muda (Studi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya partai dalam mewariskan platform partai kepada kader muda DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya partai dalam mewariskan platform partai kepada kader muda PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Platform partai, khususnya dalam konteks partai politik di Indonesia. Dengan menganalisis Platform dan strategi PDI Perjuangan dalam pengembangan kader muda, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang proses regenerasi kepemimpinan politik dan dinamika internal partai dalam menghadapi perubahan demografi pemilih.

Manfaat Praktis:

a) Bagi lembaga

Khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Lampung, penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan strategi partai dalam membina generasi penerus, sehingga dapat memperkuat regenerasi kepemimpinan partai di masa depan. Selain itu, temuan penelitian juga dapat membantu partai mengoptimalkan program-program pengkaderan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kader muda di era modern.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang proses kaderisasi dalam partai politik, khususnya PDI Perjuangan. Hal ini dapat mendorong partisipasi politik yang lebih aktif di kalangan generasi muda, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang peran dan potensi kaum muda dalam perpolitikan Indonesia, sehingga dapat menginspirasi lebih banyak anak muda untuk terlibat dalam proses-proses politik dan pengambilan keputusan.

c) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan ilmu politik, khususnya terkait manajemen partai politik dan pengembangan sumber daya manusia dalam konteks organisasi politik. Penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk studi lanjutan mengenai efektivitas strategi pengkaderan partai politik di berbagai daerah di Indonesia, serta perbandingan antar partai dalam hal pengembangan kader muda. Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi bahan kajian untuk menganalisis tren dan dinamika politik generasi muda di Indonesia, yang penting untuk memahami arah perkembangan demokrasi di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Platform

2.1.1. Definisi Platform

Platform partai politik memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan arah dan identitas sebuah partai. Menurut Forum Komunikasi Antar Partai Politik Kota Yogyakarta (2023), platform partai dapat diibaratkan sebagai "jiwa" dari partai politik itu sendiri. Ini karena platform tersebut memuat nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi cita-cita dan visi partai. Nilai-nilai ini bukan hanya sekedar pernyataan abstrak, melainkan menjadi kompas moral dan ideologis yang mengarahkan setiap kebijakan dan tindakan partai. Dengan demikian, platform partai menjadi kerangka dasar yang membentuk dan membatasi ruang gerak politik partai tersebut.

Lebih dari itu, Platform partai juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam konteks hubungan partai dengan konstituennya. Platform ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan partai dengan masyarakat, membangun relasi yang didasarkan pada kesamaan visi dan nilai. Dalam internal partai sendiri, platform menjadi alat pemersatu yang memotivasi dan mengikat para anggota, mulai dari tingkat pimpinan hingga kader di akar rumput. Hal ini menciptakan kohesi internal yang kuat, di mana setiap elemen partai bergerak dalam satu arah yang sama berdasarkan platform yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, platform partai tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam membangun dan memelihara hubungan yang dinamis antara partai, masyarakat, dan para anggotanya.

Platform partai politik memiliki peran vital sebagai kerangka dasar dalam komunikasi politik, sebagaimana dikemukakan oleh Pasinringi dan Bahri (2019). Platform ini tidak dapat diremehkan karena Platform menjadi pondasi utama bagi partai dalam mengartikulasikan ide-ide dan kebijakan mereka kepada masyarakat luas. Melalui platform yang jelas dan terstruktur, partai dapat menyampaikan visi, misi, dan program-program mereka dengan lebih efektif dan koheren. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami secara mendalam aspirasi dan harapan yang ingin diwujudkan oleh partai melalui berbagai program yang ditawarkan. Dengan pemahaman yang baik dari masyarakat, partai dapat membangun koneksi yang lebih kuat dengan konstituennya.

Lebih lanjut, platform partai bukan hanya berperan sebagai alat komunikasi satu arah, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun hubungan dua arah antara partai dan masyarakat. Platform yang baik dapat menjadi katalis dalam menarik dukungan publik, namun fungsinya jauh melampaui hal tersebut. Ia menjadi fondasi untuk membangun dan memelihara kepercayaan serta legitimasi partai di mata publik. Melalui konsistensi antara platform dan implementasi program, partai dapat menunjukkan kredibilitas dan komitmennya kepada masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat posisi partai dalam lanskap politik, menciptakan hubungan yang lebih stabil dan berkelanjutan dengan konstituennya. Dengan demikian, platform partai menjadi elemen kunci dalam strategi jangka panjang partai untuk mempertahankan relevansi dan pengaruhnya dalam sistem demokrasi.

Menurut Pasinringi, A., & Bahri, S. (2019) Peran platform partai politik memiliki signifikansi yang mendalam dalam lanskap politik kontemporer. platform ini berfungsi sebagai kompas multidimensi yang mengarahkan berbagai aspek operasional dan strategis partai. Pertama, sebagai panduan kebijakan, platform menjadi kerangka acuan yang krusial dalam proses perumusan kebijakan partai. Ia menjamin bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang yang

diusung oleh partai, sehingga menciptakan konsistensi dan koherensi dalam garis politik partai.

Kedua, platform berperan vital dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antara partai dan publik. Ia menjadi medium yang memungkinkan partai untuk mengartikulasikan visi, misi, dan program-programnya kepada pemilih dan masyarakat luas dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, tetapi juga untuk merangsang partisipasi politik yang lebih luas dan bermakna di kalangan masyarakat. Selanjutnya, platform memiliki fungsi penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas unik partai. Ia menjadi pembeda yang signifikan, memposisikan partai dalam spektrum ideologi dan kebijakan yang beragam, sehingga memudahkan pemilih untuk mengidentifikasi dan memilih partai yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi mereka. Terakhir, platform berfungsi sebagai sumber motivasi internal bagi seluruh elemen partai. Platform menjadi penggerak yang menyatukan dan menginspirasi para anggota, dari tingkat akar rumput hingga pimpinan tertinggi, untuk bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi partai. Dengan demikian, platform tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga katalisator dinamis yang mendorong kohesi internal dan semangat kolektif dalam mencapai tujuan-tujuan partai yang lebih besar (Pasinringi, A., & Bahri, S. (2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa platform partai politik merupakan kerangka fundamental yang mencakup nilai-nilai dasar, visi, misi, dan arah kebijakan suatu partai politik. Platform berfungsi sebagai "jiwa" partai yang menjadi kompas moral dan ideologis, panduan operasional, serta instrumen komunikasi politik. Platform ini berperan penting dalam membentuk identitas partai, mengarahkan perumusan kebijakan, memfasilitasi komunikasi dengan publik, membangun hubungan dengan konstituen, dan memotivasi anggota partai. Sebagai jembatan antara partai dan masyarakat, platform menjadi dasar untuk membangun kepercayaan, legitimasi, dan dukungan publik. Keberadaan platform yang jelas dan terstruktur memungkinkan partai untuk mengartikulasikan ide-ide mereka secara efektif, membedakan diri dalam

spektrum politik, serta menjaga konsistensi dan koherensi dalam tindakan politik mereka. Dengan demikian, Platform partai menjadi elemen vital dalam strategi jangka panjang partai untuk mempertahankan relevansi dan pengaruhnya dalam sistem demokrasi.

2.1.2 Fungsi Platform Partai dalam Penerapannya

Fungsi platform partai atau ideologi partai adalah sebagai arah dan ukuran dalam menyikapi persoalan yang ada di masyarakat, serta menjadi dasar bagi program kebijakan partai yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Ideologi juga berfungsi untuk merasionalisasikan kepentingan kelompok dan menjadi landasan untuk menyusun rencana kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, ideologi partai membantu dalam membentuk sikap dan orientasi politik yang akan dibentuk, serta nilai-nilai yang akan diperjuangkan. Menurut Prasetya (2011), terdapat beberapa fungsi spesifik dari Platform atau ideologi partai dalam penerapannya, diantaranya:

1. Pembentukan Sikap dan Orientasi Politik

Fungsi ini mengacu pada peran partai politik dalam membentuk dan mempengaruhi sikap serta pandangan politik masyarakat. Partai politik bertindak sebagai agen sosialisasi politik dengan menyebarkan ideologi, nilai-nilai, dan program-program mereka kepada publik. Melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, diskusi publik, dan penyebaran informasi, partai politik membantu membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran politik, dan mengarahkan preferensi politik masyarakat. Fungsi ini juga mencakup upaya partai dalam mendidik masyarakat tentang isu-isu politik yang relevan dan membantu mereka memahami sistem politik yang ada. Terdapat tiga aspek utama dalam pembentukan sikap dan orientasi politik, yaitu:

a) Pembentukan Nilai-Nilai Dasar

Ideologi partai membentuk nilai-nilai dasar yang akan dijadikan landasan bagi kader muda dalam berpolitik. Nilai-nilai ini mencakup

aspek ekonomi, sosial, dan politik, sehingga kader muda memiliki pandangan yang jelas tentang masyarakat yang ideal dan bagaimana mencapai hal tersebut.

b) Pengembangan Kepribadian Politik

Ideologi partai membantu kader muda mengembangkan kepribadian politik yang kuat. Kader belajar tentang pentingnya politik dan bagaimana berpartisipasi dalam proses demokrasi, sehingga kader memiliki sikap yang rasional dan konsensus dalam menyelesaikan konflik.

c) Pendidikan Politik

Partai politik melalui ideologinya memberikan pendidikan politik kepada kader muda. Kader belajar tentang sistem demokrasi, proses pembuatan kebijakan, dan bagaimana menghadapi perubahan sosial dan politik. Hal ini membantu kader menjadi pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi tantangan.

2. Rekrutmen dan Kaderisasi

Fungsi ini berkaitan dengan peran partai politik dalam mengidentifikasi, merekrut, dan mengembangkan individu-individu yang berpotensi menjadi pemimpin politik masa depan. Partai politik melakukan proses seleksi dan pelatihan untuk mencetak kader-kader yang kompeten dan berkomitmen terhadap ideologi partai. Melalui berbagai program pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan pengalaman organisasi, partai politik mempersiapkan anggotanya untuk mengisi berbagai posisi di pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya. Fungsi ini sangat penting untuk menjamin regenerasi kepemimpinan politik dan memastikan keberlangsungan partai dalam jangka panjang. Terdapat tiga bagian dalam proses rekrutmen dan kaderisasi, yaitu:

a) Seleksi dan Pemilihan Kader

Ideologi partai digunakan sebagai kriteria dalam seleksi dan pemilihan kader muda. Partai mencari individu yang memiliki

komitmen kuat terhadap ideologi partai dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugastugas politik dengan baik.

b) Pengembangan Kaderisasi

Partai politik melalui ideologinya mengembangkan program kaderisasi yang efektif. Kader muda dilatih dan diasah untuk menjadi pemimpin yang handal dalam berbagai aspek politik, sehingga kader siap mengambil peran penting dalam partai dan masyarakat.

c) Pembentukan Jaringan Politik

Ideologi partai membantu kader muda membangun jaringan politik yang luas. Kader belajar tentang pentingnya *networking* dalam politik dan bagaimana membangun hubungan yang efektif dengan berbagai kelompok masyarakat, sehingga kader dapat memperluas pengaruh partai.

3. Partisipasi Politik

Fungsi ini merujuk pada peran partai politik dalam memfasilitasi dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Partai politik menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan keprihatinan mereka kepada pemerintah. Melalui keanggotaan partai, kegiatan kampanye, dan berbagai bentuk aksi politik lainnya, partai politik memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Fungsi ini juga mencakup upaya partai dalam memobilisasi dukungan pemilih selama pemilihan umum dan menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Didalam partisipasi politik terdapat beberapa aspek yang meliputi kesadaran politik, keterlibatan aktif, serta keterampilan politik.

a) Kesadaran Politik

Ideologi partai meningkatkan kesadaran politik kader muda. Kader belajar tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan bagaimana mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b) Keterlibatan Aktif

Partai politik melalui ideologinya mendorong kader muda untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik. Kader dipersiapkan untuk menjadi aktor utama dalam proses demokrasi, baik dalam pemilihan umum maupun dalam proses pembuatan kebijakan.

c) Keterampilan Politik

Ideologi partai membantu kader muda mengembangkan keterampilan politik yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Kader belajar tentang komunikasi politik, negosiasi, dan strategi politik, sehingga kader siap menghadapi tantangan-tantangan dalam berpolitik.

Berdasarkan fungsi platform partai dalam penerapannya, dapat disimpulkan bahwa ideologi partai memiliki peran krusial dalam membentuk dan mengarahkan aktivitas politik. Fungsi-fungsi tersebut mencakup tiga aspek utama yaitu, Pembentukan Sikap dan Orientasi Politik, yang meliputi penanaman nilai-nilai dasar, pengembangan kepribadian politik, dan pendidikan politik bagi kader muda, Rekrutmen dan Kaderisasi, yang mencakup proses seleksi, pengembangan program kaderisasi, dan pembentukan jaringan politik, serta Partisipasi Politik, yang melibatkan pengembangan kesadaran politik, mendorong keterlibatan aktif, dan meningkatkan keterampilan politik kader. Melalui fungsi-fungsi ini, Platform partai tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk membentuk kader yang kompeten, memobilisasi dukungan masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi secara keseluruhan.

2.1.3 Aspek Fundamental Platform Partai

Pasinringi dan Bahri (2019) mengidentifikasi beberapa aspek fundamental yang menentukan kualitas dan efektivitas platform partai politik. Aspek fundamental yang menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kerangka ideologis

dan programatik suatu partai politik. Kejelasan visi dan misi menjadi indikator pertama yang disoroti dalam studi tersebut. Hal ini merujuk pada kemampuan partai untuk mengartikulasikan tujuan jangka panjangnya dengan jelas dan menyusun pernyataan misi yang spesifik serta terukur. Sejalan dengan ini, konsistensi ideologis juga ditekankan sebagai indikator penting, di mana harus ada keselarasan yang nyata antara prinsip-prinsip ideologis yang dianut partai dengan kebijakan-kebijakan yang diusulkan. Kedua aspek ini tidak hanya mencerminkan identitas partai tetapi juga menjadi landasan untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari konstituen.

Lebih lanjut, pentingnya komprehensivitas kebijakan, yang tercermin dari cakupan platform terhadap berbagai isu penting nasional. Hal ini berkaitan erat dengan indikator relevansi dan responsivitas, di mana platform partai harus menunjukkan kesesuaian dengan isu-isu kontemporer dan mampu merespons kebutuhan aktual masyarakat. Terakhir, feasibilitas program menjadi indikator krusial yang mengukur kelayakan implementasi dari program dan kebijakan yang diusulkan. Kombinasi dari indikator-indikator ini memberikan kerangka evaluasi yang holistik terhadap kualitas platform partai politik, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang potensi efektivitas partai dalam mewujudkan visi dan misinya di tengah dinamika politik yang kompleks.

2.2. Tinjauan Tentang Kaderisasi

2.2.1. Definisi Kaderisasi

Menurut Cangara (dalam Gusmi: 2020) Kaderisasi politik dan sosialisasi politik merupakan dua konsep yang memiliki hubungan erat. Kaderisasi politik bisa dipandang sebagai suatu bagian dari proses sosialisasi politik yang lebih luas. Melalui kaderisasi, calon-calon pemimpin politik dipersiapkan dan dibentuk untuk memahami sistem politik yang berlaku, mengadopsi nilai-nilai dan ideologi tertentu, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan. Proses ini menjadi penting

untuk memastikan kesinambungan dan regenerasi kepemimpinan dalam ranah politik.

Di sisi lain, sosialisasi politik merupakan proses yang lebih umum dan mencakup seluruh anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik, warga negara diperkenalkan dengan sistem politik yang berlaku, peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, serta cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sosialisasi politik ini membentuk persepsi, sikap, dan perilaku individu terhadap aspek-aspek politik, seperti pemerintahan, partai politik, pemilihan umum, dan isu-isu kebijakan publik. Proses ini berlangsung sepanjang hayat, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, hingga interaksi dengan media dan lingkungan sosial lainnya.

Menurut pandangan Toni Andrianus, kaderisasi memiliki dua dimensi yang saling terkait. Pertama, kaderisasi berfungsi sebagai proses "intervensi" internal oleh partai politik untuk meningkatkan kapasitas individu anggotanya. Dalam hal ini, partai berupaya melatih dan mengembangkan kader agar mampu menjalankan peran dan fungsi partai dengan baik. Kedua, secara eksternal, kaderisasi juga memiliki arti penting dalam tanggung jawab partai terhadap pendidikan politik publik. Dengan mengedukasi masyarakat tentang sistem politik, nilai-nilai partai, dan program-programnya, kaderisasi berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang politik dan demokrasi di kalangan publik. Dengan demikian, kaderisasi bukan hanya tentang mempersiapkan kader internal, tetapi juga memperkuat hubungan partai dengan masyarakat luas.

Menurut pandangan Tohirin (2007), kader dalam konteks politik adalah individu yang telah resmi menjadi anggota suatu partai politik tertentu. Mereka diterima berdasarkan mekanisme rekrutmen yang berlaku di partai tersebut. Kader memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda organisasi partai. Selain berfungsi sebagai pengelola atau pemimpin partai, mereka juga dapat diproyeksikan untuk menduduki posisi pejabat publik yang direkomendasikan oleh partai. Dengan demikian, kader memiliki tanggung

jawab penting dalam memperkuat partai dan berkontribusi pada proses politik secara lebih luas.

Kaderisasi merupakan proses yang sistematis, berkelanjutan, dan konsisten dalam membentuk generasi penerus bangsa dengan kualitas dan karakteristik yang unggul. Proses ini dirancang secara terstruktur dan berjenjang untuk menghasilkan insan-insan yang siap menjadi pejuang bangsa. Terdapat tiga komponen utama dalam proses kaderisasi yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Pertama, pendidikan kader, yang berfokus pada penyampaian berbagai pengetahuan esensial untuk membekali para kader dengan wawasan yang diperlukan. Kedua, penugasan kader, yang memberikan kesempatan bagi para kader untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan organisasi, berfungsi sebagai sarana latihan untuk mematangkan dan mendewasakan diri. Ketiga, pengarahan karir kader, di mana para kader diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan, disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing individu. Melalui integrasi ketiga komponen ini, proses kaderisasi diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang kompeten, berdedikasi, dan siap menghadapi tantangan dalam memajukan bangsa.

Menurut Miriam Budiardjo (2008), memiliki kader-kader yang berkualitas merupakan kunci utama bagi perkembangan sebuah partai politik. Dengan kader yang berkualitas, partai tersebut akan lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang. Kader yang baik akan memudahkan partai dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memberikan peluang yang lebih besar untuk mencalonkan kader-kader terbaik ke tingkat nasional. Rekrutmen politik juga dianggap sebagai upaya yang penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan partai politik.

Selain itu, proses kaderisasi politik juga berperan dalam mencari dan melatih calon-calon pemimpin masa depan. Berbagai metode dapat digunakan dalam proses kaderisasi politik, seperti melalui hubungan pribadi, upaya persuasif, dan berbagai strategi lainnya. Dengan demikian, memiliki kader-kader yang

berkualitas bukan hanya penting untuk keberlangsungan partai politik, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan pemimpin yang handal di masa depan.

2.2.2. Prinsip Kaderisasi

Syamsudin (2016:52) mengemukakan pandangan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam proses kaderisasi partai politik untuk mencapai efektivitas dan keberhasilan. Beliau mengidentifikasi tiga prinsip utama yang saling berkaitan dan bersinergi dalam membentuk sistem kaderisasi yang ideal: keterbukaan, non-diskriminasi, dan penjurangan (Hartoni, M. R. (2021)).

Prinsip pertama, keterbukaan, menekankan pentingnya aksesibilitas proses kaderisasi bagi seluruh anggota partai politik. Konsep ini menggarisbawahi bahwa setiap anggota, tanpa terkecuali, harus memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan kegiatan pengembangan kader. Keterbukaan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan manifestasi komitmen partai dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen organisasi. Implementasi prinsip keterbukaan memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika internal partai. Dengan menjamin akses yang sama bagi semua kader, termasuk anggota sayap partai yang berpotensi, partai dapat memupuk semangat kompetisi yang sehat dan transparan. Sistem ini mendorong kader untuk mengembangkan kemampuan mereka secara optimal, sambil membiasakan diri dengan persaingan yang adil dan bebas dari praktik kolusi serta nepotisme. Hasilnya, proses kaderisasi dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang tidak hanya berkualitas secara kompetensi, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi.

Prinsip kedua, non-diskriminasi, memperluas konsep keterbukaan dengan menekankan kesetaraan dalam akses dan peluang karier politik. Prinsip ini mengharuskan partai untuk membuka ruang yang sama bagi seluruh anggota

dalam mengikuti proses kaderisasi dan mendapatkan promosi, tanpa memandang latar belakang seperti warna kulit, golongan, agama, gender, atau suku. Penerapan prinsip non-diskriminasi memiliki potensi untuk mengurangi praktik oligarki dalam partai politik, terutama dalam hal kandidasi untuk pemilihan legislatif, kepala daerah, presiden/wakil presiden, serta penempatan kader di jabatan publik lainnya. Dengan menerapkan prinsip non-diskriminasi, partai politik dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasinya di mata publik. Hal ini juga mencerminkan komitmen partai terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan, yang pada gilirannya dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap partai tersebut. Lebih jauh lagi, prinsip ini dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat dalam proses politik, memperkaya wawasan dan perspektif dalam pengambilan keputusan partai.

Prinsip ketiga, berjenjang, membahas struktur dan metodologi dalam proses kaderisasi. Syamsudin mengusulkan pendekatan bertahap dan berjenjang, yang dapat dianalogikan dengan struktur piramida. Dalam model ini, kaderisasi dilakukan melalui tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga lanjut. Setiap tingkatan memiliki fokus dan intensitas yang berbeda dalam hal materi dan pengembangan kompetensi kader. Penjenjangan dalam kaderisasi memiliki dua dimensi rasionalisasi. Pertama, penjenjangan didasarkan pada pentahapan materi kaderisasi yang bersifat piramidal. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kader partai memiliki tingkat kapasitas yang setara karena melalui proses kaderisasi yang terstandarisasi. Hal ini penting untuk membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan yang kuat dan seragam di antara semua kader. Kedua, penjenjangan kaderisasi juga terkait dengan kebutuhan persyaratan dalam meniti karier organisasi. Sistem ini mengaitkan tingkat kaderisasi tertentu dengan persyaratan untuk menduduki posisi-posisi strategis di berbagai tingkatan organisasi, mulai dari lokal hingga pusat. Misalnya, untuk menjadi ketua partai atau sekretaris jenderal di tingkat tertentu, seorang kader harus telah menyelesaikan tingkat kaderisasi yang sesuai.

Implementasi sistem penjurangan ini memiliki beberapa implikasi penting bagi kehidupan internal partai. Pertama, sistem ini memastikan adanya standarisasi kapasitas di antara para kader, karena mereka semua melalui proses kaderisasi yang sama dan terstruktur. Hal ini penting untuk membangun kohesi dan keseragaman visi di dalam partai. Kedua, penjurangan menciptakan jalur karier yang jelas bagi kader. Sistem ini memungkinkan partai untuk mempersiapkan kader secara sistematis untuk posisi-posisi yang lebih tinggi, baik di dalam partai maupun di pemerintahan. Sebagai contoh, seorang kader yang telah menyelesaikan kaderisasi tingkat pertama mungkin akan memiliki jenjang karier politik yang terbatas pada tingkat kabupaten/kota, baik sebagai pengurus partai, anggota legislatif, atau kepala daerah. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem penjurangan ini juga harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari rigiditas yang berlebihan. Partai perlu memastikan bahwa sistem ini tetap fleksibel dan responsif terhadap dinamika politik yang berubah, serta mampu mengakomodasi bakat-bakat luar biasa yang mungkin muncul di luar jalur konvensional.

Dengan menerapkan ketiga prinsip ini - keterbukaan, non-diskriminasi, dan penjurangan - partai politik dapat menciptakan sistem kaderisasi yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya akan menghasilkan kader-kader berkualitas yang siap memimpin, tetapi juga memperkuat integritas dan legitimasi partai di mata anggota dan masyarakat luas. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip-prinsip ini berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa partai politik dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah aspirasi dan sarana pengkaderan pemimpin masa depan secara efektif dan bertanggung jawab.

2.2.3. Kriteria Kader

Menurut Andrianus (dalam Gusmi, 2020) Agar sebuah partai politik dapat berfungsi secara optimal dan mencapai tujuan-tujuannya, diperlukan adanya keselarasan antara kader-kadernya dengan ideologi dan aturan-aturan yang

dianut oleh partai tersebut. Kesesuaian ini menjadi prasyarat utama bagi seorang kader untuk dapat berperan secara efektif dalam mendukung perjuangan partai. Bentuk keselarasan ini dapat diwujudkan dengan penerimaan dan pemahaman yang utuh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, serta visi dan misi yang menjadi arah perjuangan partai. Dengan demikian, kader-kader tersebut memiliki komitmen dan loyalitas yang kuat terhadap partai dan siap mendedikasikan diri untuk memperjuangkan cita-cita bersama.

Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, partai politik tidak dapat mentolerir keberadaan kader-kader yang secara fundamental bertentangan dengan kepemimpinan dan ideologi partai. Kader-kader yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan Platform perjuangan partai, atau bahkan memiliki loyalitas yang lebih kuat terhadap partai lain, tidak dapat dipertahankan dalam keanggotaan partai. Hal ini disebabkan oleh potensi mereka untuk menghambat kemajuan partai atau bahkan menjadi sumber perpecahan internal. Oleh karena itu, partai politik harus tegas dalam menegakkan disiplin dan menerapkan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh kadernya terlibat aktif dalam struktur organisasi partai dan berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan partai secara konsisten.

Terdapat tiga bentuk kriteria kader yang umumnya berlaku dalam partai politik. Pertama, partai masa (*mass party*), di mana kader harus memiliki kesamaan ideologi dengan partai, memiliki kedekatan sosio-kultural dengan basis pendukung partai, dihasilkan melalui proses pengkaderan internal, dan berperan sebagai simpul mobilisasi massa. Kedua, partai kader (*cadre party*), di mana kader memiliki kesamaan ideologi meskipun dalam batas yang lebih fleksibel, bisa dihasilkan melalui pengkaderan internal maupun eksternal, memiliki kualitas untuk merancang kebijakan partai dan menduduki jabatan publik, serta tidak harus menjadi simpul massa. Terakhir, partai *catch all*, di mana kader memiliki kesamaan ideologi dalam batas yang sangat longgar, memiliki kesesuaian dengan isu-isu utama partai untuk memenangkan pemilu, bisa berasal dari mantan kader partai lain, dan memiliki kapasitas

untuk merancang kebijakan dan menduduki jabatan publik (Andrianus dalam Gusmi, 2020).

Perbedaan kriteria kader ini mencerminkan perbedaan orientasi dan strategi partai dalam membangun kekuatan politiknya. Partai masa cenderung menekankan pada ideologi yang kuat, basis massa yang solid, dan proses pengkaderan internal yang ketat. Sementara itu, partai kader lebih terbuka dalam merekrut kader dari luar asalkan memiliki kapasitas untuk merancang kebijakan dan menduduki jabatan publik. Adapun partai *catch all* memiliki kriteria yang paling fleksibel, dengan fokus utama pada kesesuaian dengan isu-isu strategis dan kemampuan untuk memenangkan pemilu. Meskipun berbeda, ketiga bentuk kriteria ini tetap menekankan pentingnya kesamaan ideologi, meskipun dalam tingkat yang bervariasi, serta kapasitas kader untuk merancang kebijakan dan menduduki jabatan publik.

2.3. Tinjauan Tentang Partai Politik

2.3.1 Definisi Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai politik merupakan suatu organisasi yang memiliki cakupan nasional, artinya keberadaan dan aktivitasnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini tidak terbentuk secara spontan, melainkan didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam sistem politik negara (dalam Irrubai, 2014).

Pembentukan partai politik didasari oleh prinsip kesukarelaan, yang berarti tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Para pendiri dan anggotanya bergabung atas kemauan sendiri, didorong oleh kesamaan visi, misi, dan cita-cita politik. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik merupakan wadah bagi mereka yang memiliki pandangan dan aspirasi politik yang sejalan.

Menurut Pamungkas (dalam Gusmi, 2020), istilah "partai politik" berasal dari dua kata, yaitu "partai" dan "politik". Kata "partai" sendiri memiliki akar dari

bahasa Inggris "*party*", yang memiliki makna serupa dengan istilah dalam olahraga atau event. Namun, secara lebih mendalam, kata "partai" sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu "*partire*" yang berarti "membagi" (*to divide*). Hal ini menunjukkan bahwa konsep partai pada awalnya merujuk pada sebuah kelompok atau bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, yang memiliki kepentingan atau pandangan yang berbeda dengan kelompok lainnya.

Sementara itu, kata "politik" merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya di dalam suatu negara atau masyarakat. Dengan demikian, ketika kedua kata tersebut digabungkan menjadi "partai politik", maka istilah ini mengacu pada sebuah kelompok atau organisasi yang memiliki pandangan, kepentingan, dan tujuan tertentu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional. Partai politik menjadi wadah bagi individu-individu yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam bidang politik untuk berkumpul, mengorganisir diri, dan memperjuangkan kepentingan mereka melalui jalur-jalur yang sah dan konstitusional.

Menurut Michael G. Roskin (dalam Isharyanto, 2017) partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan tindakan pemerintah. Partai politik bertindak sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan warga negara di satu sisi, dengan responsivitas pemerintah dalam menanggapi tuntutan rakyat di sisi lain. Dalam konteks ini, elit dan kader partai politik dituntut untuk menjadi pejuang aspirasi rakyat. Mereka harus mampu menerjemahkan suara dan kepentingan masyarakat ke dalam program-program dan kebijakan yang dapat diadvokasi dan diimplementasikan oleh pemerintah. Dengan demikian, partai politik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara kehendak rakyat dengan tindakan nyata pemerintah.

Kemampuan partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan

partai politik dalam institusi pemerintahan. Ketika partai politik dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan menyuarakan aspirasi masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap partai politik akan meningkat. Sebaliknya, jika partai politik gagal dalam mewakili suara rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan elite atau golongan tertentu, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Oleh karena itu, partai politik harus senantiasa berupaya untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas mereka sebagai pejuang aspirasi rakyat. Dengan cara inilah, keberadaan partai politik dalam institusi pemerintahan dapat dilegitimasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

Partai politik merupakan sebuah entitas terorganisir yang beranggotakan individu-individu dengan orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang selaras. Sebagaimana dikemukakan oleh Budiardjo (2008), partai politik menjadi wadah bagi sekelompok orang yang memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk berkumpul dan bersatu padu. Mereka terikat oleh seperangkat prinsip dan ideologi yang menjadi perekat dalam memperjuangkan agenda bersama. Dengan kata lain, partai politik menjadi kendaraan bagi sekelompok masyarakat untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam ranah politik.

Lebih lanjut, tujuan utama dari pembentukan partai politik adalah untuk meraih kekuasaan politik dan menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Namun demikian, upaya untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan melalui cara-cara yang konstitusional dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Partai politik berupaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat melalui pemilihan umum atau saluran demokratis lainnya. Jika berhasil meraih kekuasaan, partai politik kemudian dapat mengimplementasikan program-program yang telah dicanangkan sebelumnya demi mewujudkan cita-cita bersama anggotanya. Dengan demikian, partai politik menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi, di mana mereka berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat dan pemegang mandat untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu

Partai politik dapat dipandang sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang terstruktur dan stabil. Sebagaimana dikatakan oleh Friedrich (dalam Budiardjo, 2008), partai politik merupakan kumpulan manusia yang terorganisir secara solid dan berkelanjutan. Mereka memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan kata lain, partai politik bertujuan untuk menempatkan pemimpin-pemimpinnya pada posisi-posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Hal ini dilakukan agar partai politik dapat menerapkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang sesuai dengan visi dan misi mereka.

Selain itu, Friedrich juga menekankan bahwa penguasaan partai politik terhadap pemerintahan bukan semata-mata untuk kepentingan para pemimpinnya saja. Namun, penguasaan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada anggota-anggota partai politik, baik secara idiil maupun materiil. Secara idiil, partai politik dapat memperjuangkan nilai-nilai dan ideologi yang diyakini oleh anggotanya melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Sedangkan secara materiil, partai politik dapat memberikan keuntungan atau akses tertentu kepada anggotanya, seperti jabatan pemerintahan atau program-program yang menguntungkan mereka. Dengan demikian, partai politik menjadi wadah bagi sekelompok orang untuk meraih kekuasaan sekaligus mewujudkan kepentingan dan aspirasi bersama.

2.3.2. Fungsi Partai Politik

Budiardjo (2008) mengemukakan bahwa dalam sistem demokrasi, partai politik umumnya dapat menjalankan perannya sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Mereka berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara dan memperjuangkan kepentingan mereka di hadapan pemerintah. Sebaliknya, dalam sistem otoriter, partai politik sering kali tidak dapat menjalankan fungsi idealnya, melainkan lebih banyak menjadi alat untuk menjalankan kehendak penguasa. Lebih lanjut, Budiardjo mengidentifikasi beberapa fungsi utama partai politik:

a) Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berperan sebagai jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Mereka menampung aspirasi masyarakat, merumuskannya menjadi usulan kebijakan, dan memperjuangkannya melalui parlemen. Sebaliknya, partai politik juga menyebarluaskan dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Fungsi ini memastikan terjadinya dialog yang efektif antara yang memerintah dan yang diperintah, membantu pemerintah memahami tuntutan masyarakat dan masyarakat memahami kebijakan pemerintah.

b) Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses di mana individu membentuk sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Proses ini berperan penting dalam membentuk pandangan politik seseorang, termasuk pemahaman tentang nasionalisme, kelas sosial, etnis, ideologi, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partai politik memainkan peran penting sebagai agen sosialisasi politik. Mereka berupaya membangun citra bahwa partai memperjuangkan kepentingan publik. Strategi ini sangat penting mengingat tujuan utama partai adalah untuk meraih kekuasaan melalui kemenangan dalam pemilihan umum.

c) Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik berperan dalam merekrut dan memilih calon pemimpin, baik untuk internal partai maupun kepemimpinan nasional. Mereka berusaha menarik dan mengembangkan kader-kader berkualitas untuk memperkuat posisi partai dan meningkatkan peluang dalam kompetisi politik. Selain itu, partai juga berupaya memperluas keanggotaan melalui berbagai organisasi massa. Proses rekrutmen ini penting untuk menjamin keberlangsungan partai dan menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Metode rekrutmen

dapat dilakukan melalui kontak pribadi, persuasi, atau cara-cara lainnya.

d) **Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik**

Partai politik berperan penting dalam mengelola potensi konflik yang muncul dari keberagaman masyarakat, baik dari segi etnis, sosial-ekonomi, maupun agama. Dalam sistem demokrasi, partai politik diharapkan dapat menjembatani perbedaan dan meminimalisir dampak negatif dari konflik yang mungkin timbul. Mereka bertugas membangun pengertian di antara kelompok-kelompok yang berbeda, menjadi penghubung antara warga negara dan pemerintah, serta mengartikulasikan berbagai tuntutan masyarakat.

2.3.3. Partisipasi Politik

Menurut Miaz (2012) Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aspek dan proses politik. Konsep ini mencakup peran serta masyarakat dalam seluruh rangkaian kebijakan publik, dimulai dari tahap perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada proses pengambilan keputusan, tetapi juga meliputi kesempatan warga untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, partisipasi politik merupakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mempengaruhi dan terlibat langsung dalam sistem politik dan pemerintahan di negara mereka.

Menurut McClosky (dalam Budiardjo, 2008) bahwa partisipasi politik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sukarela oleh warga masyarakat dalam konteks politik. Inti dari konsep ini adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam dua aspek utama sistem politik, pemilihan pemimpin dan pembentukan kebijakan publik. Partisipasi dalam pemilihan penguasa mencerminkan peran langsung warga dalam menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Sementara itu, keterlibatan dalam proses pembentukan kebijakan umum dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung,

menunjukkan bahwa warga memiliki kesempatan untuk mempengaruhi arah kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Penting untuk dicatat bahwa McClosky menekankan sifat sukarela dari partisipasi ini, mengindikasikan bahwa keterlibatan warga dalam proses politik seharusnya muncul dari kesadaran dan keinginan mereka sendiri, bukan karena paksaan atau manipulasi. Definisi ini menekankan peran aktif warga negara dalam sistem demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang representatif dan responsif.

Budiardjo (2008) memberikan definisi komprehensif tentang partisipasi politik yang mencakup berbagai aspek keterlibatan warga negara dalam proses politik. Partisipasi politik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk berperan aktif dalam dinamika politik suatu negara. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada pemilihan pemimpin negara melalui pemungutan suara, tetapi juga meliputi upaya-upaya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Budiardjo menjabarkan beberapa contoh konkret dari partisipasi politik, seperti kehadiran dalam pertemuan-pertemuan politik, menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota legislatif melalui lobi, bergabung dengan partai politik, atau bahkan terlibat dalam gerakan sosial yang melakukan aksi langsung. Lebih lanjut, Budiardjo menyoroti pentingnya memahami konsep ini melalui perspektif para sarjana terkemuka yang telah mempelopori studi tentang partisipasi politik, dengan fokus khusus pada peran partai politik sebagai aktor utama dalam proses ini.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (dalam Gusmi, 2020) mengklasifikasikan partisipasi politik menjadi lima bentuk utama, yaitu:

1. Aktivitas pemilihan: Meliputi pemberian suara, penggalangan dana partai, dan upaya mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobi: Upaya individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan pemimpin politik melalui komunikasi langsung.

3. Keterlibatan organisasi: Partisipasi dalam organisasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
4. Membangun koneksi: Upaya menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan kekerasan: Upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui tindakan yang merugikan fisik atau harta benda, seperti teror atau kudeta.

Irrubai (2014) menekankan peran strategis dan vital partisipasi politik pemuda dalam pemilihan umum langsung. Pertama, pemuda, sebagai agen perubahan, memiliki tanggung jawab untuk mengawal transisi demokrasi menuju tahap yang lebih substantif, yakni terwujudnya pemilu yang bebas dan adil. Kedua, dalam mengawal proses ini, pemuda dapat berperan aktif dalam berbagai kapasitas, baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun pengawas penyelenggaraan pemilu. Ketiga, pemuda diharapkan dapat menjadi agen penjaga moral dan etika politik dalam proses demokrasi, menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai luhur dalam berpolitik. Keempat, pemuda harus mampu menjadi penjaga demokrasi dengan menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai perbedaan pilihan, dan tidak terjebak dalam pragmatisme politik yang sempit. Dengan demikian, partisipasi politik pemuda tidak hanya sebatas memberikan suara, tetapi juga mencakup peran aktif dalam menjaga kualitas demokrasi, mendorong etika politik yang baik, dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati. Hal ini menegaskan bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi katalis perubahan positif dalam lanskap politik dan demokrasi di Indonesia.

2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada konsep fungsi Platform partai dalam penerapannya menurut Prasetya (2011) yang terdiri dari tiga fungsi utama. Fungsi pertama adalah pembentukan sikap dan orientasi politik yang

mencakup tiga aspek penting. Aspek pertama yaitu pembentukan nilai-nilai dasar yang meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik, dimana kader muda diharapkan memiliki pandangan yang jelas tentang masyarakat ideal dan cara mencapainya. Aspek kedua adalah pengembangan kepribadian politik yang menekankan pada pemahaman pentingnya politik dan partisipasi dalam proses demokrasi, sehingga kader dapat bersikap rasional dan mampu mencapai konsensus dalam penyelesaian konflik. Aspek ketiga yaitu pendidikan politik yang berfokus pada pemahaman sistem demokrasi, proses pembuatan kebijakan, serta kemampuan menghadapi dinamika sosial dan politik.

Fungsi kedua adalah rekrutmen dan kaderisasi yang terdiri dari tiga sub aspek. Sub aspek pertama adalah seleksi dan pemilihan kader, dimana ideologi partai menjadi kriteria utama dalam memilih kader muda yang memiliki komitmen kuat. Sub aspek kedua yaitu pengembangan kaderisasi yang dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan. Sub aspek ketiga adalah pembentukan jaringan politik yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan efektif dengan berbagai kelompok masyarakat, sehingga kader dapat memperluas pengaruh partai.

Fungsi ketiga adalah partisipasi politik yang juga memiliki tiga sub aspek penting. Sub aspek pertama adalah kesadaran politik yang dibentuk melalui pendidikan politik, forum diskusi, dan interaksi dengan anggota partai yang lebih berpengalaman untuk berbagi pengetahuan. Sub aspek kedua yaitu keterlibatan aktif yang diwujudkan melalui partisipasi kader dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye politik, acara partai, aksi sosial, hingga aktivitas di media sosial. Sub aspek ketiga adalah pengembangan keterampilan politik melalui pelatihan komunikasi, strategi dan teknik kampanye politik, serta metode analisis kebijakan publik dan pembuatan rekomendasi.

Ketiga fungsi Platform partai tersebut diimplementasikan secara sistematis dan terintegrasi oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung dalam rangka

mencapai output akhir yaitu Upaya partai dalam mewariskan platform partai kepada kader muda dapat berhasil jika didukung oleh kaderisasi yang sistematis, keterlibatan aktif dalam kegiatan partai, kesesuaian nilai individu dengan ideologi partai, keteladanan dari tokoh senior, serta komunikasi yang efektif. Sebaliknya, internalisasi bisa gagal jika kaderisasi lemah, ruang partisipasi terbatas, platform partai tidak konsisten, nilai kader bertentangan dengan ideologi partai, atau kurangnya keteladanan dari elite partai. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana kader muda memahami dan menginternalisasi nilai-nilai platform partai dalam perjalanan politik mereka.



Gambar 5. Kerangka Pikir

sumber. Data Diolah Oleh Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian, sebagai terjemahan dari kata "*research*" dalam bahasa Inggris, memiliki akar kata yang mencerminkan esensi kegiatannya. Kata "*research*" terdiri dari "*re*" yang berarti mengulang, dan "*search*" yang berarti pencarian, pengejaran, penelusuran, atau penyelidikan (Rahmadi, 2011: 8). Dengan demikian, penelitian dapat diartikan sebagai usaha berulang-ulang dalam melakukan pencarian. Namun, pencarian dalam konteks penelitian bukanlah pencarian yang tanpa arah, melainkan suatu proses yang terstruktur dan sistematis untuk memperoleh informasi atau data yang dapat digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Rahmadi (2011) menekankan bahwa penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Lebih lanjut, definisi penelitian diperkaya oleh pandangan beberapa ahli. Sanafiah Faisal, sebagaimana dikutip dalam Rahmadi (2011), mendefinisikan penelitian sebagai aktivitas menelaah sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah yang terancang dan sistematis. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya, bersifat objektif dan sah, baik mengenai fenomena alam maupun sosial. Sementara itu, Ibnu Hadjar memberikan definisi yang lebih ringkas namun mencakup esensi penelitian. Menurutnya, penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang sistematis, diikuti dengan analisis yang logis terhadap informasi yang diperoleh, untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menekankan pentingnya sistematika dalam pengumpulan data dan logika dalam analisis, yang merupakan ciri khas dari penelitian ilmiah yang membedakannya dari pencarian informasi biasa.

Penelitian terhadap Platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pengembangan Kader Muda (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung) menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metodologi yang unik dalam dunia riset ilmiah, berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini menghasilkan data berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian dalam konteks tertentu. Kekhasan penelitian kualitatif terletak pada perspektif holistik dan komprehensif yang digunakan penelitian dalam mengkaji fenomena, memungkinkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap objek penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan serangkaian tahapan yang saling terkait, dimulai dari pengumpulan data visual dan naratif (non-numerik), dilanjutkan dengan analisis mendalam, dan diakhiri dengan penafsiran yang cermat. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha memperoleh gambaran yang utuh tentang fenomena yang diteliti, menangkap nuansa dan kompleksitas yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, penelitian kualitatif menawarkan pemahaman yang kaya dan kontekstual terhadap realitas sosial yang diteliti (Pahleviannur *et.al*, 2022: 26).

Penelitian kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, merupakan pendekatan ilmiah yang komprehensif dalam bidang kemanusiaan dan ilmu sosial. Koentjaraningrat (1984) menekankan aspek disiplin ilmiah dalam pengumpulan, penjelasan, analisis, dan penafsiran fakta-fakta serta hubungan antar fenomena untuk menghasilkan pengetahuan baru. Erikson (1986) memandangnya sebagai proses investigasi intensif di lapangan, melibatkan refleksi analitis terhadap berbagai sumber data. Sementara itu, Sutopo & Arief (2010) menekankan pada deskripsi dan analisis fenomena sosial, termasuk sikap, kepercayaan, dan persepsi individu maupun kelompok. Inti dari penelitian kualitatif adalah upaya terencana untuk menafsirkan informasi melalui penggambaran, pengungkapan, dan penjelasan yang mendalam, memberikan pemahaman holistik tentang realitas sosial yang diteliti (Pahleviannur *et.al*, 2022:9).

Dalam penelitian berjudul “Platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pengembangan Kader Muda (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung)”, pendekatan kualitatif dipilih karena beberapa alasan yang saling berkaitan. Pertama, analisis fenomena politik dan sosial yang kompleks ini memerlukan data yang mendalam dan kontekstual, yang paling efektif diperoleh melalui teknik wawancara. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian untuk menggali nuansa, persepsi, dan pengalaman para kader muda serta generasi pemilih secara lebih komprehensif. Kedua, kajian mengenai dinamika politik partai membutuhkan data lapangan yang bersifat deskriptif dan tidak dapat sepenuhnya dikuantifikasi atau direpresentasikan dalam bentuk statistik. Metode kualitatif memfasilitasi pemahaman yang lebih holistik terhadap konteks sosial-politik yang melatarbelakangi peran dan tantangan kader muda PDI Perjuangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berharap dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai realitas di lapangan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi peran kader muda dalam kontribusinya terhadap kemenangan partai, serta persepsi dan respons generasi pemilih terhadap upaya-upaya tersebut.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitiannya agar memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung di Jl. P Emir M Noer, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Bandar Lampung.

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Pahleviannur, *et.al* (2022) Fokus penelitian dalam konteks kualitatif merupakan elemen kunci yang mengarahkan dan membatasi cakupan studi pada domain-domain spesifik dalam situasi sosial yang kompleks. Penentuan fokus ini tidak hanya didasarkan pada keingintahuan penelitian, tetapi lebih pada potensi

kebaruan informasi yang dapat digali dari fenomena sosial yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara mendalam tanda-tanda atau fenomena kompleks di lapangan, menganalisis hubungan sosial yang terjadi, dan bahkan berpotensi menghasilkan hipotesis atau teori baru.

Spradley, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam Pahleviannur, *et.al* (2022), memberikan empat alternatif dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, fokus dapat ditetapkan berdasarkan permasalahan yang disarankan oleh informan, memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang berinteraksi langsung dengan fenomena tersebut. Kedua, fokus dapat ditentukan berdasarkan domain-domain tertentu yang relevan dengan situasi sosial yang diteliti. Ketiga, penelitian dapat memilih fokus yang memiliki nilai temuan potensial untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, fokus dapat ditetapkan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang sudah ada, baik untuk mengonfirmasi, memperluas, atau bahkan menantang teori tersebut (Pahleviannur, *et.al*, 2022). Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk merancang studi yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman dan pengetahuan dalam bidang yang diteliti.

Fokus penelitian ini ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu pada Platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pengembangan kader muda di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung. Penelitian ini akan mengkaji tiga aspek utama dari fungsi Platform atau ideologi partai dalam pengembangan kader muda, antara lain:

1. Pembentukan Sikap dan Orientasi Politik: Pada aspek ini, penelitian akan berfokus pada bagaimana platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) digunakan untuk membentuk sikap dan orientasi politik kader muda. Aspek ini mencakup tiga sub-aspek:

- a) Pembentukan nilai-nilai dasar: Penelitian akan mengkaji bagaimana platform partai membentuk landasan ideologis bagi kader muda dalam memahami aspek ekonomi, sosial, dan politik. Ini termasuk analisis tentang

nilai-nilai inti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) yang ditanamkan pada kader muda dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pandangan mereka tentang masyarakat yang ideal.

b) Pengembangan kepribadian politik: Fokus ini akan meneliti bagaimana platform partai membantu kader muda mengembangkan sikap rasional dan konsensus dalam menghadapi konflik politik. Penelitian akan melihat metode-metode yang digunakan partai untuk membentuk karakter politik kader muda yang sesuai dengan ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)

c) Pendidikan politik: Sub-aspek ini akan meneliti bagaimana platform partai digunakan sebagai basis dalam memberikan pemahaman tentang sistem demokrasi dan proses pembuatan kebijakan kepada kader muda. Ini mencakup analisis program-program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) Provinsi Lampung.

2. Rekrutmen dan Kaderisasi: Aspek ini akan meneliti bagaimana platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) diimplementasikan dalam proses rekrutmen dan pengembangan kader muda. Penelitian akan berfokus pada tiga sub-aspek:

a) Seleksi dan pemilihan kader: Penelitian akan mengkaji kriteria berbasis Platform partai dalam proses seleksi kader muda. Ini termasuk analisis tentang bagaimana ideologi partai menjadi pertimbangan dalam pemilihan calon kader muda di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) Provinsi Lampung.

b) Pengembangan kaderisasi: Sub-aspek ini akan meneliti program-program pengembangan kader yang didasarkan pada platform partai. Fokus akan diberikan pada bentuk-bentuk pelatihan, workshop, atau kegiatan lain yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kader muda sesuai dengan ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan)

c) Pembentukan jaringan politik: Penelitian akan menganalisis bagaimana Platform partai memfasilitasi kader muda dalam membangun jaringan politik yang luas. Ini mencakup studi tentang strategi dan program partai yang memungkinkan kader muda untuk berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat dan politik.

3. Partisipasi Politik: Aspek terakhir akan berfokus pada bagaimana Platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) mendorong partisipasi politik aktif di kalangan kader muda. Penelitian akan mencakup tiga sub-aspek:

a) Kesadaran politik: Fokus ini akan mengkaji bagaimana Platform partai meningkatkan pemahaman kader muda tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Penelitian akan melihat metode-metode yang digunakan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesadaran politik kader muda.

b) Keterlibatan aktif: Sub-aspek ini akan meneliti bagaimana Platform partai mendorong kader muda untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Ini termasuk analisis tentang peran kader muda dalam kegiatan-kegiatan partai, kampanye, dan proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.

c) Keterampilan politik: Penelitian akan menganalisis bagaimana Platform partai membantu kader muda mengembangkan kemampuan komunikasi politik, negosiasi, dan strategi politik. Fokus akan diberikan pada program-program pelatihan atau mentoring yang disediakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) Provinsi Lampung untuk meningkatkan keterampilan politik kader muda.

3.3. Penentuan Informan

Dalam melakukan penelitian kualitatif, khususnya studi kasus, pemahaman mendalam terhadap kancah penelitian dan pemilihan informan kunci (*key informan*) merupakan langkah awal yang krusial. Abussamad (2021) menjelaskan bahwa studi kasus adalah penelitian mendalam tentang suatu entitas spesifik, seperti individu,

kelompok, atau program, dalam periode tertentu, bertujuan untuk memperoleh deskripsi utuh dan menghasilkan teori berdasarkan analisis data. Pendekatan ini, menurut Baxter & Jack (2008), dilakukan secara intensif dan terperinci untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang objek penelitian yang aktual dan sedang berlangsung.

Teknik pengumpulan data dalam studi kasus umumnya melibatkan wawancara, observasi, dan analisis arsip. Sugiyono (2019) menekankan penggunaan teknik *Purposive Sampling* dalam pemilihan informan, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan spesifik, seperti pengetahuan atau otoritas yang dimiliki terkait topik penelitian (Warsono, *et.al* 2022). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami objek atau situasi sosial yang diteliti dengan lebih efektif, menggunakan pemahaman interpretatif untuk menggali makna dan konteks dari fenomena yang diteliti. Penelitian memfokuskan informan pada (*stakeholder*) di lingkup Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Provinsi Lampung.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Jabatan	Instansi	Nama
1	Kader Muda dan Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung	Deddy Wijaya Chandra, S.Kom
2	Wakil ketua bidang ideologi dan kaderisasi	DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung	H. Watoni Noerdin, S.H.,M.H
3	Sekretaris Internal	DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung	Aprilliati, S.H.,M.H
4	Wakil ketua bidang keanggotaan dan organisasi	DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung	Dr. Yanuar Irawan, S.E, M.M
5	Kader Muda Perempuan	DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung	Lesty Putri Utami, S.H., K.Kn
6	Badan Pendidikan Dan Pelatihan	DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung	Ignatius Agus Suwardaya
7	Pengamat Politik/Akademisi	Universitas Lampung	Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan fondasi penting dalam proses pengolahan informasi. Pada dasarnya, data terdiri dari serangkaian fakta mentah atau catatan peristiwa yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut. Dalam bentuk aslinya, data seringkali sulit dipahami atau bahkan tidak dapat langsung diterima oleh akal pikiran penerimanya. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan data untuk mengubahnya menjadi informasi yang bermakna dan dapat diinterpretasikan dengan mudah. Data dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti angka, kata-kata, karakter, suara, atau simbol-simbol lainnya. Keragaman bentuk data ini memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaannya, namun juga mengharuskan adanya metode pengolahan yang sesuai untuk mengekstrak nilai dan makna dari data tersebut. Dengan pengolahan yang tepat, data mentah dapat ditransformasikan menjadi informasi yang berharga dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengambilan keputusan hingga analisis kompleks.

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Menurut Sugiyono dalam Rahmadani (2021: 8-9), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh penelitian atau pihak pertama. Pengumpulan data primer biasanya dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi langsung, wawancara. Keunggulan utama data primer adalah tingkat akurasi dan relevansinya yang tinggi, karena data tersebut dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memenuhi tujuan spesifik suatu studi.

Data sekunder, di sisi lain, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada atau data dokumentasi. Sugiyono dalam Rahmadani (2021: 8-9) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia dalam berbagai bentuk dokumentasi. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari Dokumen AD/ART Partai PDI Perjuangan, dokumen/materi kurikulum pendidikan politik, dokumentasi kegiatan pemberian materi nilai-nilai dasar, Dokumen/materi kurikulum pelatihan kepemimpinan, testimonial kader tentang pengembangan kepribadian politik, dokumen/materi kurikulum pendidikan politik, jadwal dan

daftar peserta pendidikan politik, dokumentasi kegiatan pendidikan politik, Struktur Organisasi Partai PDI Perjuangan, dokumen kriteria seleksi kader, dokumen Instruksi Rekrutmen Calon Peserta Pendidikan Kader Madya, daftar kader yang lolos seleksi dan terpilih, Jadwal dan materi kegiatan kaderisasi tingkat madya, dokumen keanggotaan, dokumen kerja sama dengan organisasi lain, dokumentasi kegiatan jejaring dan komunikasi politik, dokumentasi diskusi/seminar politik, hasil survei tingkat kesadaran politik kader, dokumentasi keikutsertaan kader dalam kegiatan politik, dokumentasi kader terlibat dalam kegiatan politik,

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Susanto (2022) Teknik pengumpulan data memainkan peran krusial dalam proses penelitian, terutama dalam konteks penelitian kualitatif. Sebagaimana ditekankan oleh para ahli, langkah ini merupakan aspek paling strategis karena keberhasilan mendapatkan data yang memenuhi standar adalah tujuan utama dari setiap penelitian. Hamzah dalam Susanto (2022) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data kualitatif berfokus pada pengumpulan data deskriptif, yang mencakup berbagai bentuk informasi seperti hasil wawancara, observasi, foto, dokumen, artefak, dan catatan lapangan. Dalam hierarki kepentingan data, kata-kata dan tindakan subjek penelitian dianggap sebagai data primer, sementara bentuk data lainnya berfungsi sebagai pendukung. Untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan valid, penelitian mengandalkan tiga teknik utama, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, memungkinkan penelitian untuk menggali informasi mendalam dari partisipan. Esterberg dalam Pahleviannur *et.al* (2022) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang memungkinkan konstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini berlandaskan pada laporan diri (*self-report*) atau keyakinan dan pengetahuan pribadi partisipan. Susan Stainback (1988) menekankan bahwa wawancara memungkinkan penelitian untuk

memahami hal-hal yang lebih mendalam tentang interpretasi partisipan terhadap situasi dan fenomena yang tidak dapat diperoleh melalui observasi semata.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah peneliti pilih sebelumnya yaitu DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Peneliti melakukan wawancara mendalam dan direkan dengan bantuan *handphone* dan dicatat dalam buku catatan pribadi. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang peneliti lakukan:

Pada hari Rabu, 19 November 2024 peneliti telah melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi bapak H. Watoni Noerdin, S.H.,M.H di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pukul 10.30 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada hari Jum'at, 6 Desember 2024 peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris internal Partai ibu Aprilliati S.H., M. di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pukul 13.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada hari Jum'at, 6 Desember 2024 peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Bapak Dr. Yanuar Irawan, S.E, M.M di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pukul 14.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada hari Kamis, 12 Desember 2024 peneliti melakukan wawancara dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Bapak Ignatius Agus Suwardaya di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada hari Senin, 23 Desember 2024 peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kader Muda Bapak Deddy Wijaya Chandra, S.Kom di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada hari Selasa, 24 Desember 2024 peneliti melakukan wawancara dengan Pengamat Politik/Akademisi Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. di kampus Universitas Lampung pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada hari Jum'at, 17 Januari 2025 peneliti melakukan wawancara dengan Kader Muda Perempuan ibu Lesty Putri Utami, S.H., K.Kn di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pukul 11.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang fundamental dalam penelitian kualitatif, melibatkan penggunaan pancaindra untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Guba dan Lincoln dalam Susanto (2022) menekankan bahwa observasi dapat menghasilkan data berupa peristiwa, aktivitas, objek, kondisi, atau emosi seseorang. Patton, sebagaimana dikutip oleh Nasution dalam Susanto (2022), menguraikan berbagai manfaat observasi, antara lain: memungkinkan pemahaman konteks yang menyeluruh, memberikan pengalaman langsung kepada penelitian, mengungkap hal-hal yang mungkin terlewatkan dalam wawancara, menemukan informasi sensitif, dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi pengamatan langsung dengan cara mengamati, meninjau, mencatat langsung di lokasi penelitian terhadap Platform PDI Perjuangan Dalam Pengembangan Kader Muda dengan menggunakan teori Fungsi *Platform* Partai dalam Penerapannya menurut Prasetya. Peneliti melakukan observasi secara bertahap menggunakan variabel pembentukan sikap dan orientasi politik, rekrutmen dan kaderisasi, serta partisipasi politik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah dalam Pahleviannur *et.al* (2022), merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis fakta dan informasi yang tersimpan dalam berbagai bentuk dokumentasi. Metode ini mencakup berbagai jenis data, termasuk laporan, artefak, foto, dan materi

lainnya, yang memiliki keunggulan dalam memberikan akses ke informasi historis tanpa batasan ruang dan waktu. Dokumentasi dapat dibagi menjadi dua kategori utama: dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi meliputi catatan harian, surat-surat, dan autobiografi, yang menawarkan perspektif orisinal tentang pengalaman dan pandangan individu. Sementara itu, dokumen resmi terdiri dari dokumen internal (seperti memo, aturan lembaga, dan notulen rapat) dan dokumen eksternal (seperti koran dan majalah) yang memberikan gambaran tentang aktivitas dan keterlibatan subjek dalam konteks sosial tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat Kembali dokumen DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, foto yang telah diambil peneliti selama magang, serta rekaman suara pada saat wawancara dengan narasumber.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian merupakan tahap krusial yang dilakukan setelah pengumpulan data. Menurut Efendi dkk dalam Singarimbun (2008:240), proses ini terdiri dari dua tahap utama: editing dan interpretasi data. Tahap editing melibatkan peninjauan ulang data yang telah dikumpulkan untuk memastikan validitasnya dan kesiapannya untuk analisis lebih lanjut. Dalam konteks penelitian kualitatif, ini mencakup pengolahan hasil wawancara dengan menyelaraskannya pada fokus pedoman wawancara, serta pemilihan data observasi yang relevan dan menarik. Tahap interpretasi data melibatkan analisis mendalam terhadap data yang telah dideskripsikan, baik dalam bentuk narasi maupun tabel, untuk menarik kesimpulan yang bermakna (Ardi, 2023). Proses ini juga melibatkan pertimbangan etis dalam menampilkan data sensitif, dengan pemilihan kata yang hati-hati untuk menghindari potensi kerugian bagi pihak-pihak terkait. Hasil penelitian yang lengkap kemudian disajikan dalam lampiran, dengan memastikan relevansi antara data yang ditampilkan dan hasil penelitian. Melalui proses pengolahan data yang sistematis dan cermat ini, penelitian dapat menghasilkan temuan penelitian yang valid, bermakna, dan etis.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses yang kompleks dan dinamis, sebagaimana dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam Warsono *et.al* (2022: 21). Mereka menekankan bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan, berlangsung terus-menerus hingga mencapai titik kejenuhan data, di mana tidak ada lagi informasi baru yang signifikan yang dapat diperoleh. Proses analisis ini terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait dan berinteraksi secara simultan: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap kritis dalam analisis data kualitatif yang melibatkan proses seleksi, fokus, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Proses ini bertujuan untuk mempertajam, mengkategorikan, dan mengorganisasi data sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang valid. Mereduksi data berarti merangkum informasi, mengidentifikasi hal-hal pokok, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah ini membantu penelitian memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data yang telah dikumpulkan dan mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya. Dalam melakukan reduksi data, penelitian dipandu oleh tujuan penelitian dan tetap waspada terhadap temuan-temuan baru atau pola-pola yang belum dikenal, yang mungkin memiliki signifikansi dalam konteks penelitian kualitatif. Dengan demikian, reduksi data bukan hanya proses penyederhanaan, tetapi juga merupakan analisis yang menajamkan pemahaman penelitian terhadap fenomena yang diteliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap penting yang melibatkan pengorganisasian informasi secara sistematis untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori atau sub-kategori yang relevan, dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami, seperti teks deskriptif,

tabel, atau bagan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan informasi yang telah dikumpulkan menjadi suatu bentuk yang padu dan mudah diakses, memungkinkan penelitian untuk memahami pola dan hubungan antar data dengan lebih baik. Penyajian data yang efektif tidak hanya mempermudah pemahaman bagi penelitian dan pembaca, tetapi juga membantu dalam merencanakan langkah-langkah penelitian selanjutnya berdasarkan temuan yang ada. Dengan demikian, penyajian data berfungsi sebagai jembatan antara data mentah dan interpretasi akhir dalam proses analisis kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap final dalam analisis data kualitatif. Proses ini melibatkan pengujian keabsahan data melalui validitas internal dan eksternal, reliabilitas, serta objektivitas. Kesimpulan awal bersifat tentatif dan dapat berubah seiring dengan penemuan bukti-bukti baru. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu menjawab rumusan masalah awal, melainkan dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Temuan ini bisa berbentuk deskripsi yang memperjelas fenomena yang sebelumnya kabur, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori baru. Proses verifikasi dan penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan terpadu tentang fenomena yang diteliti, sekaligus memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas yang ditemukan di lapangan.

Dalam proses analisis data kualitatif, penelitian menjalankan serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis untuk mengolah informasi yang diperoleh dari lapangan. Tahapan ini dimulai dengan peninjauan menyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan, di mana penelitian menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan sebagai lensa analitis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Proses ini melibatkan transformasi data mentah dari catatan lapangan menjadi bentuk yang lebih terorganisir dan terkategori. Selanjutnya, data mengalami proses reduksi, di mana informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian disingkirkan, meninggalkan esensi yang paling penting dan relevan.

Data yang telah direduksi kemudian ditampilkan dalam format yang memudahkan analisis lebih lanjut, seperti matriks, grafik, atau narasi terstruktur. Penelitian kemudian melakukan pemeriksaan keabsahan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Proses ini melibatkan triangulasi sumber data, metode, atau teori untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Akhirnya, berdasarkan analisis mendalam dan pemeriksaan keabsahan, penelitian menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan baru tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan ini merupakan sintesis dari seluruh proses analisis, merefleksikan pemahaman komprehensif penelitian terhadap data yang telah diolah dan diinterpretasikan.

3.8. Teknik Validasi/ Keabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam (Nurfajriani, dkk. (2024), Triangulasi metode merupakan suatu teknik pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang sama menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam implementasinya, peneliti menerapkan minimal tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati fenomena yang diteliti, mendalami dengan sumber atau penelitian, serta untuk mengumpulkan bukti-bukti. Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut kemudian, dibandingkan, dan secara keseluruhan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data penelitian dengan melakukan *cross-check* antar teknik pengumpulan data, sehingga dapat meminimalkan bias dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memvalidasi temuan, tetapi juga memperkuat integritas keseluruhan proses penelitian kualitatif, memungkinkan hasil yang lebih dapat diandalkan dan bermakna dalam kontribusinya terhadap pengetahuan ilmiah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berangkat dari teori Fungsi Platform Partai dalam Penerapannya (Prasetya, 2011), dapat disimpulkan bahwa upaya DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung dalam mewariskan platform partai kepada kader muda telah dilakukan melalui pendekatan yang cukup sistematis dalam tiga indikator utama, yaitu pembentukan sikap dan orientasi politik, rekrutmen dan kaderisasi, serta partisipasi politik. Meskipun terdapat berbagai bentuk kegiatan dan program yang sejalan dengan nilai-nilai ideologis partai, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan baik secara struktural maupun kultural, yang berdampak pada efektivitas pewarisan nilai-nilai platform kepada kader muda.

1. Pembentukan Sikap dan Orientasi Politik

DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung telah menjalankan fungsi ini melalui penyelenggaraan pendidikan politik di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), pelatihan ideologi, dan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Marhaenisme yang menjadi dasar ideologis partai. Kader muda dikenalkan pada semangat perjuangan Bung Karno, nilai-nilai Trisakti, serta pentingnya perjuangan bersama rakyat melalui prinsip gotong royong. Kegiatan seperti haul Bung Karno, diskusi ideologi, dan keterlibatan dalam gerakan sosial merupakan media internalisasi nilai tersebut. Namun, tantangan utama dalam indikator ini adalah belum tersedianya instrumen yang mampu mengukur sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar terinternalisasi dalam sikap dan perilaku kader muda. Pemahaman kader masih cenderung bersifat formalitas dan simbolik, belum sepenuhnya menyentuh aspek penghayatan dan penerapan nilai secara nyata dalam keseharian maupun dalam posisi strategis partai.

2. Rekrutmen dan Kaderisasi

Upaya rekrutmen dan kaderisasi dilakukan melalui mekanisme berjenjang dan terstruktur, mulai dari kaderisasi pratama, madya, hingga utama. Proses seleksi didasarkan pada komitmen ideologis, kepemilikan KTA, rekam jejak organisasi, dan loyalitas terhadap pimpinan partai. Program ini dimaksudkan untuk membentuk kader-kader muda yang militan, cakap, dan ideologis. Namun, pelaksanaan di lapangan masih diwarnai hambatan struktural, seperti dominasi kader senior, praktik patronase, dan akses yang terbatas bagi kader muda ke jenjang pengambilan keputusan. Selain itu, persepsi tentang diskriminasi dalam proses seleksi dan kurangnya afirmasi terhadap kader dari sayap partai juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan keberlanjutan kaderisasi yang inklusif dan meritokratis. Budaya senioritas yang kuat juga membuat kader muda yang potensial kesulitan menembus ruang strategis di tubuh partai.

3. Partisipasi Politik

DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memberikan ruang partisipasi politik yang relatif luas kepada kader muda melalui pelibatan dalam kegiatan kampanye, advokasi kebijakan, kerja-kerja sosial, hingga aktivitas digital politik seperti pengelolaan media sosial. Kader muda didorong untuk tampil sebagai juru bicara partai, mengorganisir kegiatan kepemudaan, serta menjadi penghubung antara partai dan generasi milenial serta Gen Z. Namun demikian, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya menjamin adanya peran strategis dalam proses pengambilan kebijakan partai. Partisipasi masih bersifat kegiatan teknis dan seremonial, belum menyentuh pada aspek pengaruh dalam penentuan arah kebijakan maupun regenerasi struktural. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan ruang dialog antara kader muda dan pimpinan partai, serta penataan sistem pelibatan politik yang lebih terstruktur dan berjenjang.

Dengan demikian, meskipun secara konseptual DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung telah menjalankan ketiga fungsi utama platform partai sebagaimana dijelaskan oleh Prasetya (2011), implementasinya masih memerlukan penyempurnaan agar lebih adaptif, terukur, dan responsif terhadap tantangan regenerasi politik. Penguatan evaluasi kaderisasi berbasis capaian ideologis, pembukaan ruang promosi politik yang setara, serta pelibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan dalam mewariskan platform partai secara utuh kepada generasi muda.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terkait dengan analisis platform partai dalam pengembangan kader muda, maka peneliti mengajukan beberapa saran, diantaranya:

1. Pembentukan Sikap dan Orientasi Politik

PDI Perjuangan Provinsi Lampung perlu menyusun instrumen evaluasi ideologi yang dapat mengukur sejauh mana kader muda memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai ideologi partai dalam kehidupan politik dan sosial mereka. Selain itu, disarankan agar pendidikan politik tidak hanya dilakukan dalam bentuk ceramah atau doktrinasi satu arah, tetapi juga melalui pendekatan dialogis, studi kasus, serta simulasi peran (roleplay) yang menempatkan kader muda pada situasi nyata pengambilan keputusan politik berbasis ideologi. Kegiatan-kegiatan ini juga perlu diintegrasikan dengan teknologi dan budaya populer agar lebih kontekstual dengan karakter generasi milenial dan Gen Z.

2. Rekrutmen dan Kaderisasi

Untuk meningkatkan kualitas rekrutmen dan kaderisasi, partai perlu menerapkan sistem rekrutmen yang transparan, terbuka, dan berbasis meritokrasi, bukan semata-mata kedekatan personal atau loyalitas terhadap elite. Kriteria ideologi tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan

pengukuran kapasitas kepemimpinan, inovasi, dan rekam jejak sosial kader muda. Selain itu, perlu adanya kebijakan afirmatif yang memberikan ruang lebih luas bagi kader muda perempuan, kader dari sayap partai, serta kader dengan latar belakang non-elit. Penataan jalur karier politik yang jelas dan terukur (pemetaan karir) juga perlu dikembangkan untuk mencegah stagnasi potensi kader di level bawah.

3. Partisipasi Politik

Partai perlu memastikan bahwa partisipasi politik kader muda tidak hanya bersifat teknis dan seremonial, tetapi juga substansial dan strategis. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader muda dalam forum perumusan kebijakan partai, penugasan konkret dalam strategi tim-tim, serta keterlibatan dalam penyusunan program legislasi dan advokasi publik. Selain itu, partai juga bisa membentuk forum kader lintas muda daerah sebagai ruang aktualisasi dan pertukaran gagasan politik. Perluasan partisipasi juga dapat diperkuat dengan dukungan terhadap inisiatif kader muda dalam bidang-bidang inovatif seperti teknologi digital, lingkungan hidup, dan kewirausahaan sosial yang sejalan dengan ideologi partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- ARDI, A. (2023). PENERAPAN PRINSIP ADVOKASI DALAM PEMBELAAN HAK BURUH (Studi Pada Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Pelabuhan Panjang).
- Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), cet. ke II, h. 408
- Ditri, A. R. (2022). *Strategi Rekrutmen Kader Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Fauzi, M. R. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Platform Partai Politik Dan Manajemen Partai Politik Terhadap Kinerja Kader Partai Politik Untuk Peningkatan Raihan Suara Partai Politik Di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Gerald, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 135-157.
- GUSMI, I. (2020). *Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Kurniasih, W. (2019). Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(01), 261-270.
- Irrubai, M. L. (2014). Partai Politik Dan Pemilih Pemula. *Society*, 5(2), 61-71.
- Isharyanto, S. H. (2017). *Partai Politik, Ideologi dan Kekuasaan*. Absolute Media.
- Iswadi, I. (2020). Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(1), 3-21.
- Ismail Suardi Wekke, D. (2019). Metode Penelitian Sosial. *Metode Penelitian Sosial*, 1.
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi.
- Krisdianto, S. R., Anggadifa, Y. S., & Tamba, E. (2020). Penerapan nilai-nilai marhaenisme pada dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia

- perjuangan Provinsi Jambi. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 16-28.
- Kristeva, N. S. S. (2010). Sejarah Ideologi Dunia: Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, Marxisme, dan Konservatisme. 1–92.
- KUNCOROJATI, M. R. (2020). *ANALISIS TIPOLOGI ORGANISASI DAN KAMPANYE POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (Studi Kasus Kampanye Politik DPD PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilu Serentak 2019 di DIY)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Kurniasih, W. (2019). Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(01), 261-270.
- Nurdiaman, M., Hasyim, S. B., Purnawan, R. A., & Kalamullah, K. (2019). Analisis Proses Kaderisasi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 2(2), 27-32.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Rahmadi, R. (2011). Pengantar metodologi penelitian.
- Tohirin, Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke II, h. 34
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik The Role of Political Parties In Conducting Political Education. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(1), 51-59.
- Pasinringi, A., & Bahri, S. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Platform Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2019. *Kinesik*, 6(3), 263-277.
- Prasetya, I. Y. (2011). Pergeseran peran ideologi dalam partai politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 30-40.
- Rahmadani, A. (2021). Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Padangsidempuan periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(02), 71-85.
- Rohman, N. (2023). Peran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Presiden 2024: Analisis Terhadap Pemilih Pemula. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1), 85-102.

Setyawati, N. K. D., Prijowidodo, G., & Inggrit, I. (2018). Pola Komunikasi Organisasi PDI Perjuangan dalam Proses Kaderisasi di DPC Kabupaten Sidoarjo. *Scriptura*, 8(1), 30-40.

Sholikhah, M. (2009). Sistem kaderisasi partai politik (studi kasus pada Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Malang).

Warsono, H., Astuti, R. S., & Ardiyansah, A. (2022). Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas. fi.

Diakses pada 7 september 2024 dari <https://kupastuntas.co/2024/03/25/pdi-perjuangan-lampung-raih-114-kursi-dpr-ri-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupatenkota-di-pemilu-2024>

Diakses pada 28 Oktober 2024 dari <https://kupastuntas.co/2024/03/24/gerindra-kuasai-lima-dapil-di-lampung-pdi-perjuangan-hanya-menang-tiga-dapil>

Diakses pada 12 september 2024 dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/12/2106336/PDI-P.Menang.di.17.Provinsi>

Diakses pada 14 Januari 2025 dari <https://www.gesuri.id/internal/sutono-jelaskan-sejumlah-kegiatan-yang-digelar-banteng-lampung-sambut-hut-ke-52-pdi-perjuangan-b2ngYZS7W>

Diakses pada 14 Januari 2025 dari <https://www.antaraneews.com/berita/2295548/kantor-pdi-perjuangan-di-lenteng-agung-jadi-gedung-sekolah-partai>

Diakses pada 11 Maret 2025 dari <https://indikator.co.id/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>

Diakses pada 11 Maret 2025 dari <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/0f7cb739fa16a12/psi-belum-lolos-ambang-batas-parlemen-dalam-survei-indikator-politik>

Diakses pada 11 Maret 2025 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250130132619-32-1192733/pdip-jadi-parpol-dengan-citra-positif-terendah-versi-litbang-kompas>

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik